

**KAJIAN
EKONOMI REGIONAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Triwulan IV - 2006

**Kantor Bank Indonesia
Mataram**

Penerbit :

BANK INDONESIA MATARAM

Bidang Ekonomi, Moneter dan Perbankan
Seksi Statistik dan Kajian Ekonomi Moneter
Jl. Pejanggik No.2 Mataram
Nusa Tenggara Barat

Telp. : 0370-623600 ext. 111

Fax : 0370-631793

E-mail : b_widihartanto@bi.go.id

ariadi_d@bi.go.id

sariani@bi.go.id



MISI DAN VISI BANK INDONESIA

Visi Bank Indonesia :

“Menjadi lembaga Bank Sentral yang dapat dipercaya secara nasional maupun internasional melalui penguatan nilai-nilai yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan stabil”

Misi Bank Indonesia :

“Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pemeliharaan kestabilan moneter dan pengembangan stabilitas sistem keuangan untuk pembangunan jangka panjang negara Indonesia yang berkesinambungan”

Nilai-nilai Strategis Organisasi Bank Indonesia :

“Nilai-nilai yang menjadi dasar organisasi, manajemen dan pegawai untuk bertindak atau berperilaku yaitu kompetensi, integritas, transparansi, akuntabilitas dan kebersamaan”

Visi Kantor Bank Indonesia Mataram :

“Mewujudkan Kantor Bank Indonesia yang dapat dipercaya melalui peningkatan perannya sebagai economic intelligence dan unit penelitian”

Misi Kantor Bank Indonesia Mataram :

“Berperan aktif dalam pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia dalam mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pelaksanaan kegiatan operasional di bidang ekonomi, moneter, perbankan, sistem pembayaran secara efektif dan efisien dan peningkatan kajian ekonomi regional serta koordinasi dengan pemerintah daerah serta lembaga terkait”

KATA PENGANTAR

Perekonomian Nusa Tenggara Barat pada triwulan IV tahun 2006 mengalami pertumbuhan sebesar 4,35% (y-o-y), terutama didorong pertumbuhan dari sektor perdagangan, hotel dan restoran. Perlu menjadi catatan, secara kumulatif (y-t-d) perekonomian NTB hanya tumbuh 1,65% yang disebabkan menurunnya determinan sisi permintaan sepanjang semester I 2006 akibat kenaikan harga BBM di akhir 2005, yang berangsur pulih di paruh waktu kedua tahun 2006. Sementara itu, laju inflasi Kota Mataram terus menunjukkan trend yang menurun. Secara kumulatif (y-t-d) inflasi tercatat pada level moderat sebesar 4,16%.

Membbaiknya pertumbuhan ekonomi turut berpengaruh pula terhadap kinerja perbankan regional, terlihat dari trend kinerja positif yang ditunjukkan oleh perbankan di NTB hingga akhir triwulan IV 2006. Hal tersebut tercermin dari peningkatan aset dan dana pihak ketiga (DPK) masing-masing sebesar 6,44%(q-t-q) dan 12,56%(q-t-q). Namun demikian laju peningkatan kredit relatif lambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang hanya mencapai 2,2% .

Di samping ulasan di atas, buku ini juga mengupas perkembangan makro ekonomi regional, perkembangan inflasi, perkembangan perbankan dan sistem pembayaran, perkembangan keuangan dan investasi serta prospek ekonomi ke depannya yang dapat menjadikan masukan bagi Kantor Pusat Bank Indonesia maupun *stakeholders* di daerah.

Bank Indonesia sangat *concern* dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional yang akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, antara lain dengan melakukan penelitian dan kajian serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah dalam mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi termasuk pengendalian harga barang dan jasa.

Ucapan terima kasih dan penghargaan atas kerjasamanya kepada semua pihak terutama jajaran Pemerintah Daerah baik Propinsi, Kabupaten ataupun Kota, dinas/instansi terkait, perbankan, akademisi dan pihak lainnya yang telah membantu penyediaan data sehingga buku ini dapat dipublikasikan.

Semoga buku ini bermanfaat dan kiranya Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat bagi kita semua dalam berkarya.

Mataram, Februari 2006

BANK INDONESIA MATARAM

I Made Sudja

Pemimpin

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i	
DAFTAR ISI	ii	
DAFTAR TABEL	v	
DAFTAR GRAFIK & LAMPIRAN	vii	
RINGKASAN EKSEKUTIF	ix	
BAB I	Perkembangan Ekonomi Makro Regional	1
	1.1 Ringkasan Umum Pertumbuhan Ekonomi Propinsi NTB	1
	1.2 PDRB menurut Penggunaan/sisi pengeluaran	3
	1.2.1 Gambaran Umum	3
	1.2.2 Pengeluaran Konsumsi	4
	1.2.3 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	5
	1.2.4 Pertumbuhan Net Ekspor (Ekspor – Impor) Regional & Internasional	5
	1.2.5 Kinerja Ekspor - Impor Luar Negeri Propinsi NTB	6
	1.3 PDRB menurut sisi sektoral (penawaran)	8
	1.3.1 Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi Propinsi NTB	8
	1.3.2 Pertumbuhan Ekonomi Propinsi NTB ditinjau Secara Tahunan (y-o-y)	9
	1.3.3 Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha	9
	1.3.3.1 Kondisi Dunia Usaha	9
	1.3.3.2 Penggunaan Tenaga Kerja	11
	1.3.4 Tinjauan Pertumbuhan Ekonomi Secara Sektoral	11
	1.3.4.1 Sektor Pertanian	11
	1.3.4.2 Sektor Pertambangan dan Penggalian	12
	1.3.4.3 Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran	12
	1.3.4.4 Sektor Pengangkutan dan Komunikasi	13
	1.3.4.5 Sektor Industri Pengolahan	14
	1.3.4.6 Sektor Lainnya	14
	1.4 Tenaga Kerja ke Luar Negeri	15

BAB II	Evaluasi Perkembangan Inflasi Propinsi Nusa Tenggara Barat	17
	2.1 Gambaran Umum Inflasi di Propinsi Nusa Tenggara Barat	17
	2.2 Inflasi Inti, Inflasi <i>Volatile Food</i> , Inflasi <i>Administered Price</i>	17
	2.3 Inflasi Triwulanan (q-t-q) Kota Mataram	18
	2.3.1 Inflasi Triwulanan (q-t-q) Kota Mataram Triwulan IV-2006	18
	2.3.2 Trend Inflasi Triwulanan (q-t-q) Kota Mataram	18
	2.4 Inflasi Tahunan (y-o-y) Kota Mataram	20
	2.5 Komoditi Penyumbang Inflasi dan Deflasi Terbesar	22
	2.6 Perbandingan Inflasi Kota Mataram dengan Kota Terdekat	23
BAB III	Perkembangan Perbankan dan Sistem Pembayaran	24
	3.1 Kinerja Perbankan di Propinsi Nusa Tenggara Barat	24
	3.2 Bank Umum	25
	3.2.1 Kelembagaan	25
	3.2.2 Aset	25
	3.2.3 Dana Pihak Ketiga	26
	3.2.4 Kredit	28
	3.2.5 Loan to Deposit Ratio (LDR)	33
	3.2.6 Profitabilitas & Efisiensi Bank Umum	33
	3.3 Bank Umum Syariah	34
	3.4 Perkembangan BPR	35
	3.4.1 Kelembagaan	35
	3.4.2 Asset	35
	3.4.3 Dana Pihak Ketiga	36
	3.4.4 Perkembangan Kredit yang diberikan	36
	3.4.5 Loan to Deposit Ratio (LDR)	37
	3.4.6 Profitabilitas & Efisiensi BPR	38
	3.5 Perkembangan Sistem Pembayaran	38
	3.5.1 Transaksi Keuangan Secara Tunai	39
	3.5.1.1 Aliran Uang Masuk/Keluar (Inflow/Outflow)	39
	3.5.1.2 Uang Palsu	40
	3.5.2 Transaksi Keuangan Secara Non Tunai	40
	3.5.2.1 Transaksi RTGS (<i>Real Time Gross Settlement</i>)	40
	3.5.2.2 Transaksi Kliring	41

BAB IV	Perkembangan Keuangan Daerah di Propinsi Nusa Tenggara Barat	42
BAB V	Perkembangan Investasi di Nusa Tenggara Barat	49
BAB VI	Prospek Perekonomian dan Inflasi Regional	48
	5.1 Prospek Makro Ekonomi Regional (<i>Economic Outlook</i>)	48
	5.2 Prospek Inflasi	49
	5.3 Isu-isu Strategis dan Rekomendasi	49
BOKS 1	Peranan Kredit Sektoral Pada Nilai PDRB Sektoral NTB	29-a

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1.1. Pertumbuhan PDRB Sisi Pengeluaran	2
Tabel 1.2. Negara Tujuan Ekspor Terbesar dan Pelabuhan Muat Ekspor NTB	7
Tabel 1.3. Realisasi Impor Propinsi NTB	8
Tabel 1.4. Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi Propinsi NTB	8
Tabel 1.5. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (ADH Konstan 2000)	9
Tabel 1.6. Nilai Balance Score Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha	10
Tabel 2.1. Inflasi Triwulanan (q-t-q) Triwulan III-2006 & Triwulan IV-2006	19
Tabel 2.2. Inflasi Triwulanan (y-o-y) Triwulan III-2006 & Triwulan IV-2006	21
Tabel 2.3. Komoditi Penyumbang Inflasi Terbesar di Kota Mataram Triwulan IV-2006	22
Tabel 2.4. Komoditi Penyumbang Deflasi Terbesar di Kota Mataram Triwulan IV-2006	23
Tabel 2.5. Perbandingan Inflasi Kota Mataram dengan Kota Terdekat Triwulan IV-2006	23
Tabel 3.1. Indikator Utama Perbankan NTB	25
Tabel 3.2. Komposisi Golongan Pemilik Dana	27
Tabel 3.3. Komposisi Penghimpunan dan Sebaran Dana Pihak Ketiga	28
Tabel 3.4. Perkembangan Jumlah Rekening DPK Bank Umum	28
Tabel 3.5. Penyaluran Kredit Berdasarkan Lokasi Kantor Bank Umum	32
Tabel 3.6. Rasio LDR Bank Umum Per September 2006	33
Tabel 3.7. Indikator Utama Bank Umum Syariah di NTB	34
Tabel 3.8. Indikator Utama BPR di NTB	35
Tabel 3.9. Perkembangan Kredit dan NPL BPR di NTB	36
Tabel 3.10. Perkembangan aliran uang di KBI Mataram	39
Tabel 3.11. Uang palsu yang ditemukan di Kantor Bank Indonesia Mataram	40
Tabel 3.12. Transaksi RTGS di Kantor Bank Indonesia Mataram	41
Tabel 3.13. Data perputaran Kliring di KBI Mataram	41

Tabel	4.1.	Realisasi APDB 2006 Hingga Triwulan IV 2006 Propinsi NTB	42
Tabel	4.2.	Persentase Realisasi APDB 2006 Hingga Triwulan IV 2006 Propinsi NTB	43
Tabel	5.1.	Rekapitulasi Rencana & Realisasi PMA & PMDN Prop NTB s.d. Des 06	44
Tabel	5.2.	Rekapitulasi Rencana & Realisasi PMA & PMDN Prop NTB s.d. Sept 06	45

DAFTAR GRAFIK

	Hal
Grafik 1.1. PDRB & Pertumbuhan Ekonomi NTB	1
Grafik 1.2. Pertumbuhan PDRB NTB Triwulanan (y-o-y)	3
Grafik 1.3. Indeks Hasil Survei Konsumen Kota Mataram	4
Grafik 1.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	5
Grafik 1.5. Pertumbuhan Ekspor Impor NTB	6
Grafik 1.6. PDRB & Pertumbuhan Sektor Pertanian	11
Grafik 1.7. PDRB & Pertumbuhan Sektor Pertambangan dan Penggalian	12
Grafik 1.8. PDRB & Pertumbuhan Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran	13
Grafik 1.9. PDRB & Pertumbuhan Sektor Pengangkutan dan Komunikasi	13
Grafik 1.10. PDRB & Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	14
Grafik 1.11. Negara Penampung TKI NTB Terbanyak - Triwulan IV-2006	15
Grafik 1.12. Daerah Asal TKI NTB - Triwulan IV-2006	16
Grafik 1.13. Latar Belakang Pendidikan TKI NTB	16
Grafik 2.1. Inflasi Kota Mataram	17
Grafik 2.2. Pergerakan Inflasi Umum, Inflasi Inti, <i>Administered Price & Volatile Food</i> Kota Mataram	18
Grafik 2.3. Inflasi (q-t-q) Kota Mataram Per Komoditi (1)	19
Grafik 2.4. Inflasi (q-t-q) Kota Mataram Per Komoditi (2)	20
Grafik 3.1. Perkembangan DPK Bank Umum	26
Grafik 3.2. Perkembangan Golongan Pemilik DPK Bank Umum	27
Grafik 3.3. Perkembangan Kredit di NTB	26
Grafik 3.5. Perkembangan Outstanding Kredit Menurut Jenis Penggunaan	29
Grafik 3.6. Pertumbuhan Kredit Menurut Jenis Penggunaan	29
Grafik 3.7. Perkembangan Outstanding Kredit Sektoral	29
Grafik 3.8. Pertumbuhan Kredit Sektoral	29

Grafik 3.9.	Komposisi Golongan Debitur Bank Umum Per Desember 2006	30
Grafik 3.10.	Sebaran Perkembangan Penyaluran Kredit Bank Umum	30
Grafik 3.11.	Pertumbuhan Sebaran Kredit Bank Umum	31
Grafik 3.12.	Perkembangan NPL Bank Umum	31
Grafik 3.13.	Perkembangan Kredit UKM yang disalurkan Bank Umum	31
Grafik 3.14.	Perkembangan LDR Bank Umum	33
Grafik 3.15.	Perkembangan Profitabilitas Bank Umum	33
Grafik 3.16.	Perkembangan Bank Umum Syariah di NTB	35
Grafik 3.17.	Perkembangan Aset BPR Per Wilayah	35
Grafik 3.18.	Perkembangan DPK BPR di NTB	36
Grafik 3.19.	Peningkatan DPK BPR Per Wilayah	36
Grafik 3.20.	Perkembangan NPL Kredit BPR Pemda	37
Grafik 3.21.	Perkembangan NPL Kredit BPR Swasta	37
Grafik 3.22.	Perkembangan LDR BPR di NTB	37
Grafik 3.23.	Perkembangan Profitabilitas & Efisiensi BPR di NTB	38
Grafik 3.24.	Perkembangan Temuan Uang Palsu	40

RINGKASAN EKSEKUTIF

Perkembangan Ekonomi, Inflasi dan Perbankan di Nusa Tenggara Barat

Perekonomian Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengalami pertumbuhan positif sebesar 4,35%(y-o-y) pada triwulan IV-2006. Namun demikian secara kumulatif (y-t-d) perekonomian NTB hanya tumbuh 1,65% yang disebabkan menurunnya determinan permintaan sepanjang semester I 2006 akibat pukulan kenaikan harga BBM di akhir 2005. Pada periode ini, seiring pulihnya sisi permintaan pada paruh waktu kedua tahun 2006, PDRB NTB meningkat mencapai Rp 4,05 triliun berdasarkan harga konstan atau Rp 7,4 triliun berdasarkan harga berlaku.

Secara sektoral, mesin pertumbuhan ekonomi masih bertumpu pada dua sektor yakni sektor pertambangan dan penggalian serta sektor pertanian. Hal ini ditunjukkan oleh distribusi PDRB sebesar 37,79% untuk sektor pertambangan & penggalian dan 22,35% untuk sektor pertanian. Di sisi lain, sektor perdagangan, hotel & restoran terus menunjukkan perkembangan positif. Pada triwulan berjalan, sektor tersebut memberi sumbangan pertumbuhan tertinggi yakni 1,21% diikuti sektor pertambangan & penggalian sebesar 1,12%. Sektor pertanian sendiri walaupun memiliki distribusi PDRB yang lebih besar dibandingkan sektor perdagangan, hotel & restoran, hanya mampu memberi kontribusi pertumbuhan sebesar 0,44%.

Bila dibandingkan akhir tahun 2005, struktur perekonomian di NTB relatif tetap. Sektor pertambangan & penggalian serta sektor pertanian tetap menjadi sektor yang dominan. Hal tersebut tampak dari *share* PDRB masing-masing sektor, yakni sektor pertanian sebesar 22,35% (sedikit menurun dibandingkan triwulan IV tahun lalu sebesar 22,96%) dan sektor pertambangan & penggalian sebesar 37,79% (sedikit meningkat dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar 36,62%). Selain itu, sektor lain yang juga berperan cukup besar pada triwulan ini adalah sektor perdagangan, sektor jasa-jasa dan sektor pengangkutan.

Dari sisi penggunaan, struktur PDRB ditandai adanya pergeseran dari sisi konsumsi ke arah ekspor. *Share* ekspor NTB yang pada triwulan pertama tahun 2006 sebesar 34,63%, telah mengalami peningkatan dan mencapai 49,63% pada akhir triwulan ini. Pergeseran peranan kedua sektor tersebut semakin baik dampaknya terhadap upaya mendorong perekonomian NTB.

Sektor perdagangan, hotel dan restoran terus mengalami peningkatan pertumbuhan, untuk triwulan berjalan sektor ini mampu tumbuh sebesar 8,59%, tertinggi dibandingkan sektor lainnya. Kontribusi sektor tersebut pada periode ini tercatat 1,21%, terbesar setelah sektor pertambangan & penggalian. Konsistensi sektor perdagangan, hotel dan restoran selama tahun 2006 dalam memacu pertumbuhan ekonomi cukup signifikan, pada akhir 2005 sektor ini tercatat tumbuh 3,03% untuk kemudian terus bertumbuh hingga mencapai rekor tertinggi sebesar 8,59% di akhir 2006. Terdapat dua sektor lain yang menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan di atas 6% yakni sektor

pengangkutan & komunikasi (7,08%) dan sektor listrik, gas & air bersih (6,85%). Kontribusi kedua terbesar 1,12% disumbangkan oleh sektor pertambangan & penggalian yang hingga saat ini masih memegang pangsa terbesar (37,79%) terhadap PDRB NTB.

Sementara itu, di sisi penggunaan menunjukkan perkembangan positif dengan rekor tertinggi pertumbuhan dicatat oleh komponen impor sebesar 8,79% (y-o-y) meningkat dibandingkan triwulan pertama tahun 2006 yang hanya sebesar 1,54% (y-o-y). Diperkirakan optimisme sektor riil menyongsong 2007 telah mendorong dilakukannya investasi yang menyebabkan peningkatan komponen impor. Ekspor yang sempat mengalami kontraksi di triwulan sebelumnya, mampu bangkit dan mencatat pertumbuhan 6,34% (y-o-y) pada triwulan berjalan. Di lain sisi, komponen konsumsi secara konsisten menunjukkan pertumbuhan positif dengan pertumbuhan tertinggi oleh komponen konsumsi lembaga nirlaba 6,68% dan terendah oleh komponen konsumsi pemerintah 4,07%. Masih dominannya konsumsi membuat perekonomian NTB rentan terhadap penurunan daya beli konsumen di NTB, sehingga peranan komponen lain seperti konsumsi pemerintah untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi perlu ditingkatkan.

Harga barang-barang di kota Mataram pada triwulan keempat tahun 2006 mengalami peningkatan. Peningkatan terjadi baik secara bulanan (m-t-m), triwulanan (q-t-q), tahunan (y-o-y) maupun kumulatif (y-t-d). Secara kumulatif dibandingkan akhir tahun 2006, kota Mataram mengalami inflasi yang relatif moderat sebesar 4,16%. Bila dibandingkan dengan akhir triwulan sebelumnya, inflasi kota Mataram meningkat mencapai 1,93%.

Trend pergerakan inflasi tampak stabil dengan kecenderungan menurun sejak akhir tahun 2005. Lonjakan tajam pada akhir tahun 2005 diperkirakan sudah terlewati dengan cukup baik dan perekonomian mulai menggeliat dengan stimulus inflasi yang relatif stabil. Kondisi perekonomian yang relatif stabil di penghujung 2006 turut mendorong pertumbuhan positif perekonomian pada triwulan berjalan mencapai 4,35% (y-o-y).

Trend kinerja positif secara konsisten ditunjukkan oleh perbankan di Nusa Tenggara Barat (NTB) hingga akhir triwulan IV 2006. Hal tersebut terlihat dari peningkatan aset dan dana pihak ketiga (DPK) masing-masing mencapai 6,44%(q-t-q) dan 12,56%(q-t-q). Namun demikian laju peningkatan kredit relatif lambat dibandingkan triwulan sebelumnya hanya mencapai 2,2%. Lambatnya penyaluran kredit dibandingkan peningkatan DPK membuat rasio *loan to deposit* (LDR) turun dari 84,28% menjadi 77,22%. Sementara itu, tingkat risiko kredit menunjukkan perbaikan dengan turunnya rasio *non performing loan* (NPL) dari 3,05% menjadi 2,76%.

Di sisi lain, kegiatan pada sistem pembayaran relatif stabil dengan kecenderungan menurun pada akhir tahun. Kegiatan pembayaran non tunai via kliring maupun sarana BI *real time gross settlement* (RTGS) masih didominasi kegiatan transaksi pemerintah terutama terkait dengan dana-dana perimbangan, kelanjutan bantuan langsung tunai (BLT) dan bantuan operasional sekolah (BOS).

Masih dominannya transaksi ekonomi secara tunai menyebabkan jumlah uang tidak layar edar terus mengalami peningkatan pada mencapai 31,4% dari jumlah uang masuk ke KBI Mataram per akhir triwulan IV-2006. Temuan uang palsu secara nominal pada periode ini mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya dari Rp18 juta menjadi Rp12,85 juta.

Prospek Makro Ekonomi Regional (*Economic Outlook*) dan Inflasi

Berdasarkan hasil survei kegiatan dunia usaha (SKDU) terhadap para pelaku dunia usaha, diperkirakan pada triwulan I-2007 mendatang, para pengusaha akan mengalami peningkatan kegiatan usaha pada beberapa sektor terutama pada sektor pertanian dan sektor keuangan, persewaan & jasa perusahaan yang tercermin pada saldo bersih tertimbang (SBT) 14,05%. Indikasi meningkatnya perkiraan kegiatan usaha tercermin pada persepsi responden terhadap beberapa indikator, seperti ekspektasi positif terhadap produksi dan permintaan pada beberapa sektor.

Peningkatan kegiatan usaha diperkirakan akan terjadi pada beberapa sektor, terutama pada sektor pertanian yang tercermin pada SBT sebesar 16,05% serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dengan nilai SBT yang tidak begitu signifikan sebesar 2,97%. Di sektor pertanian, peningkatan kegiatan usaha diperkirakan terjadi karena peningkatan pada subsektor tanaman bahan makanan dan subsektor tanaman perkebunan. Sementara itu, ekspektasi responden yang menyatakan bahwa sektor pertanian mengindikasikan akan terjadi peningkatan kegiatan usaha didorong oleh perkiraan peningkatan kegiatan produksi serta peningkatan volume permintaan.

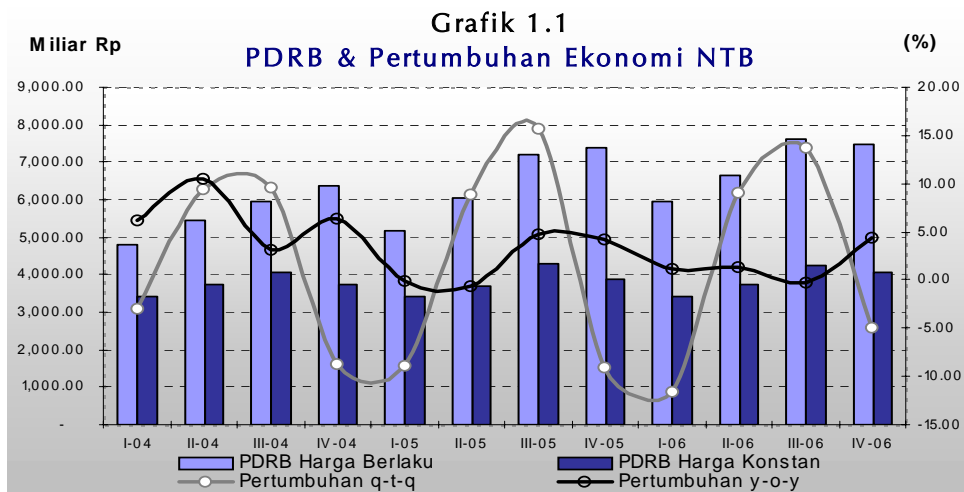
Meninjau lebih jauh, gambaran beberapa indikator makro ekonomi yang disurvei menunjukkan bahwa pada triwulan I-2007, harga jual/tarif diperkirakan akan kembali mengalami peningkatan dengan SBT sebesar 1,67%. Perkiraan kenaikan tersebut terutama disebabkan naiknya harga bahan baku dan biaya operasional perusahaan. Namun demikian, sejumlah responden memperkirakan bahwa pada triwulan mendatang akan terjadi penurunan harga pada sektor pertanian dengan meningkatnya produksi/panen. Berdasarkan kondisi yang diperkirakan tersebut dan ekspektasi hasil survei, pertumbuhan ekonomi NTB pada triwulan I-2007 diprediksi akan berkisar pada angka 4% ($\pm 1\%$).

Mencermati perkembangan laju inflasi Kota Mataram, pada triwulan I-2007 diperkirakan masih akan terus mengalami perlambatan dari periode sebelumnya, karena kondisi perekonomian regional yang semakin stabil dari sisi pergerakan harga-harga barang secara umum. Diperkirakan pada akhir triwulan pertama 2007 Kota Mataram akan mengalami inflasi sebesar 2% ($\pm 1\%$). Dengan asumsi tidak ada lagi kebijakan pemerintah yang berpengaruh terhadap inflasi *administered prices* secara kumulatif (y-t-d) sampai dengan akhir tahun 2007, angka inflasi Kota Mataram diprediksi dapat berada pada kisaran angka yang cukup rendah, sebesar 5% ($\pm 1\%$).

BAB I PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO REGIONAL

1. 1. RINGKASAN UMUM PERTUMBUHAN EKONOMI PROPINSI NTB

Pada triwulan IV 2006, perekonomian Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengalami pertumbuhan positif sebesar 4,35% (y-o-y). Pencapaian tersebut relatif lebih baik dibandingkan pertumbuhan ekonomi selama semester pertama 2006 yang berada di kisaran 1-1,5% seiring berangsur pulihnya sisi permintaan pada paruh waktu kedua di 2006. Namun demikian secara kumulatif (y-t-d) perekonomian NTB hanya tumbuh 1,65% yang disebabkan menurunnya determinan permintaan sepanjang semester I 2006 akibat pukulan kenaikan harga BBM di akhir 2005. Pada periode ini, PDRB NTB mencapai Rp 4,05 triliun berdasarkan harga konstan atau Rp 7,4 triliun berdasarkan harga berlaku. Secara sektoral, mesin pertumbuhan ekonomi masih bertumpu pada dua sektor yakni sektor pertambangan dan penggalian serta sektor pertanian. Hal ini ditunjukkan oleh distribusi PDRB sebesar 37,79% untuk sektor pertambangan & penggalian dan 22,35% untuk sektor pertanian.



Sumber Data : BPS Propinsi NTB, diolah

Bila dibandingkan akhir tahun 2005, struktur perekonomian di NTB relatif tetap. Sektor pertambangan & penggalian serta sektor pertanian tetap menjadi sektor yang dominan. Hal tersebut tampak dari *share* PDRB masing-masing sektor, yakni sektor pertanian sebesar 22,35% (sedikit menurun dibandingkan triwulan IV tahun lalu sebesar 22,96%) dan sektor pertambangan & penggalian sebesar 37,79% (sedikit meningkat dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya

sebesar 36,62%). Selain itu, sektor lain yang juga berperan cukup besar pada triwulan ini adalah sektor perdagangan, sektor jasa-jasa dan sektor pengangkutan.

Konsistensi sektor perdagangan, hotel dan restoran selama tahun 2006 dalam memacu pertumbuhan ekonomi cukup signifikan, pada akhir 2005 sektor ini tercatat tumbuh 3,03% untuk kemudian terus bertumbuh hingga mencapai rekor tertinggi sebesar 8,59% di akhir 2006. Terdapat dua sektor lain yang menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan di atas 6% yakni sektor pengangkutan & komunikasi (7,08%) dan sektor listrik, gas & air bersih (6,85%). Kontribusi kedua terbesar 1,12% disumbangkan oleh sektor pertambangan & penggalian yang hingga saat ini masih memegang pangsa terbesar (37,79%) terhadap PDRB NTB.

Tabel 1.1
Pertumbuhan Sisi Pengeluaran

Pertumbuhan Sisi Pengeluaran (y-o-y) ADH Konstan Th.2000 (%)	2004				2005				2006			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Pengeluaran Kons. Rmh Tangga	4.51	4.98	5.37	4.39	3.55	3.51	5.12	6.50	6.46	6.25	6.68	6.21
Konsumsi Lemb. Nirlaba	8.27	15.07	7.63	7.12	5.40	4.00	5.91	6.14	4.80	5.92	8.91	6.86
Pengeluaran Kons. Pemerintah	4.46	3.79	4.58	4.53	3.77	4.88	3.62	2.36	2.35	2.62	4.43	4.07
Pembentukan Mod. Tetap Bruto (PMTB)	5.78	8.16	7.02	9.56	6.80	5.98	5.93	-0.33	6.91	5.98	4.17	5.33
Perubahan Stok	149.09	-29.07	310.15	-27.39	29.06	-682.67	-17.47	-245.65	-2.81	0.21	-26.77	38.21
Ekspor	1.77	11.69	-4.46	15.32	-11.83	-24.85	7.56	15.02	-2.81	-2.81	-2.81	6.34
Impor	18.37	-1.21	6.21	13.90	11.41	35.02	9.13	-1.20	1.54	-0.20	7.11	8.79
Pertumb. Ek. Trmsk Pertambangan Non Migas	6.24	10.43	3.20	6.33	-0.14	-0.67	4.77	4.29	1.21	1.40	-0.25	4.35
Pertumb. Ek. Tidak Trmsk Pertambangan Non Migas	6.25	6.18	4.98	4.51	4.32	5.61	4.81	4.03	3.67	4.80	4.33	4.42

Ket : tabel pertumbuhan diatas: ADH Konstan

Sementara itu, di sisi penggunaan menunjukkan perkembangan positif dengan rekor tertinggi pertumbuhan dicatat oleh komponen impor sebesar 8,79% (y-o-y) meningkat dibandingkan triwulan pertama tahun 2006 yang hanya sebesar 1,54% (y-o-y). Diperkirakan optimisme sektor riil menyongsong 2007 telah mendorong dilakukannya investasi yang menyebabkan peningkatan komponen impor. Ekspor yang sempat mengalami kontraksi di triwulan sebelumnya, mampu bangkit dan mencatat pertumbuhan 6,34% (y-o-y) pada triwulan berjalan. Di lain sisi, komponen konsumsi secara konsisten menunjukkan pertumbuhan positif dengan pertumbuhan tertinggi oleh komponen konsumsi lembaga nirlaba 6,68% dan terendah oleh komponen konsumsi pemerintah 4,07%. Masih dominannya konsumsi membuat perekonomian NTB rentan terhadap penurunan daya beli konsumen di NTB, sehingga peranan komponen lain seperti konsumsi pemerintah untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi perlu ditngkatkan.

1.2. PDRB MENURUT PENGGUNAAN/SISI PENGELUARAN

1.2.1. Gambaran Umum

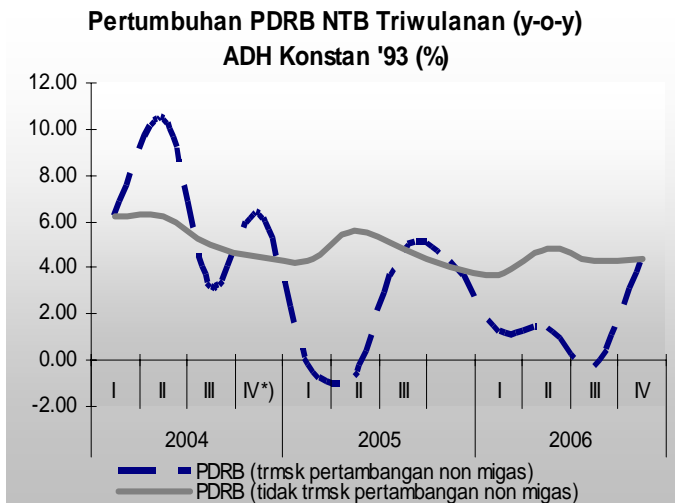
Struktur PDRB NTB dari sisi penggunaan pada periode ini relatif konsisten dengan triwulan-triwulan sebelumnya. Komponen konsumsi rumah tangga dan ekspor masih dominan dengan pangsa masing-masing terhadap PDRB mencapai 47,68% dan 39,64%. Komponen ekspor menunjukkan trend positif dengan adanya peningkatan pangsa yang sebelumnya hanya 26,19% pada awal tahun 2006. Sedangkan pangsa konsumsi rumah tangga menunjukkan trend penurunan sejak triwulan pertama 2006, walaupun sedikit mengalami peningkatan di akhir 2006.

Pada triwulan ini seluruh komponen menunjukkan pertumbuhan positif, pertumbuhan tertinggi ditunjukkan oleh komponen impor sebesar 8,79% disusul oleh komponen konsumsi lembaga nirlaba sebesar 6,86%. Kinerja impor mengalami perkembangan signifikan bila dibandingkan dengan triwulan pertama tahun 2006 yang hanya bertumbuh sebesar 1,54% dan sempat mengalami kontraksi -0,21% di triwulan kedua tahun 2006. Komponen pengeluaran

pemerintah serta komponen pembentukan modal tetap bruto mengalami pertumbuhan di kisaran 4-5%, sedangkan komponen lainnya mengalami pertumbuhan di atas 6%.

Ekspor yang sempat mengalami kontraksi pada triwulan-triwulan sebelumnya telah mampu bertumbuh positif pada triwulan berjalan mencapai 6,34%. Diperkirakan peningkatan aktivitas pertambangan serta peningkatan permintaan internasional atas komoditas tambang telah memicu pertumbuhan positif tersebut.

Grafik 1.2



Sumber Data : BPS Propinsi NTB, diolah

Indikator investasi fisik yaitu komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) mengalami peningkatan pada triwulan berjalan mencapai 5,33%. Meningkatnya optimisme sektor riil menyongsong tahun 2007 diperkirakan telah menjadi penggerak aliran investasi fisik di daerah NTB. Selain itu, indikasi peningkatan investasi fisik pada triwulan ini adalah terjadinya peningkatan aktivitas impor barang, terutama impor barang-barang modal, seperti kendaraan, mesin-mesin, dan sebagainya.

1.2.2. Pengeluaran Konsumsi

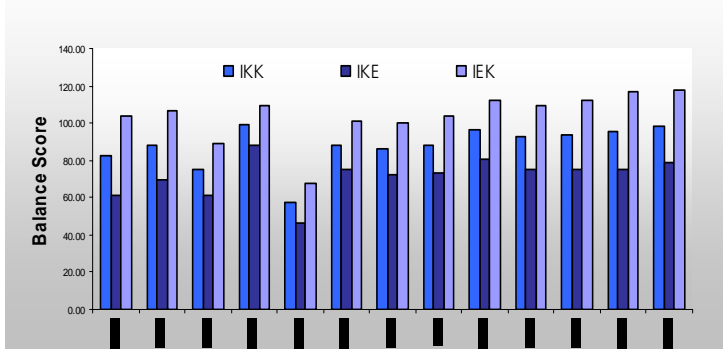
Sepanjang tahun 2006, trend konsumsi secara keseluruhan menunjukkan kecenderungan peningkatan dan memiliki kecenderungan untuk terus meningkat pada periode mendatang. Baik pengeluaran pengeluaran konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga nirlaba dan pengeluaran konsumsi pemerintah, pada triwulan IV-2006 ini mengalami percepatan pertumbuhan.

Peningkatan tersebut diperkirakan terkait dengan bertambahnya kebutuhan masyarakat untuk perayaan hari raya idul fitri dan natal yang jatuh di triwulan ini. Selain itu, pencairan dana BLT tahap terakhir, bantuan operasional sekolah (BOS) serta subsidi biaya kesehatan khususnya kepada rumah tangga atau masyarakat miskin yang jumlahnya berkisar 47% dari total rumah tangga di NTB, turut mendorong daya beli masyarakat pada periode ini.

Di sisi lain, stabilnya indikator makro ekonomi seperti tingkat inflasi baik nasional dan regional NTB pada triwulan IV-2006 mampu menjaga daya beli masyarakat. Sebagian besar masyarakat NTB masih berada pada tahapan pemenuhan kebutuhan konsumsi, sehingga peningkatan pendapatan yang diperoleh cenderung dialokasikan untuk menambah pengeluaran konsumsi rumah tangga. Sejalan dengan konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga nirlaba pada periode ini juga mengalami percepatan pertumbuhan sebesar 6,86% (pertumbuhan yang dicapai komponen ini pada triwulan pertama 2006 hanya sebesar 4,80%).

Grafik 1.3

Indeks Hasil Survei Konsumen di Kota Mataram



Sumber Data : BPS Propinsi NTB, diolah

Keterangan :

- IKK : Indeks Keyakinan Konsumen
- IKE : Indeks Kondisi Ekonomi
- IEK : Indeks Ekspektasi Konsumen

sebagian proyek-proyek pembangunan pemerintah di beberapa wilayah di NTB turut mendorong pertumbuhan di sektor ini.

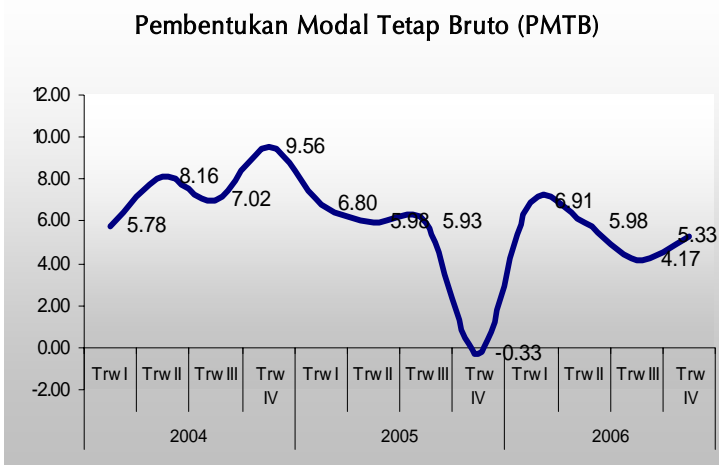
Indeks Keyakinan Konsumen yang diperoleh dari survei konsumen terus mengalami peningkatan sepanjang tahun 2006 mencapai nilai 98,147 per Desember 2006 sejalan dengan

Pada triwulan ini konsumsi pemerintah tumbuh dengan persentase terendah di antara konsumsi lainnya, hanya sebesar 4,07%. Meskipun demikian, angka pertumbuhan ini masih lebih tinggi dibandingkan pertumbuhannya pada triwulan pertama dan kedua selama tahun 2006. Peningkatan konsumsi pemerintah ini sejalan dengan meningkatnya belanja aparatur pemerintah berupa upah dan gaji pegawai pemerintah, sebagai dampak dari peningkatan jumlah pegawai. Di samping itu, realisasi

peningkatan konsumsi rumah tangga. Indeks tersebut lebih tinggi dibandingkan triwulan lalu yang hanya sebesar 92,5 walaupun masih berada pada level pesimis (nilai saldo bersih berada di bawah 100) yang menunjukkan sikap pesimis konsumen dalam menyikapi perkembangan perekonomian ke depan.

Pada penghujung tahun 2006 tingkat keyakinan konsumen hampir memasuki level optimis. Hanya komponen ketersediaan lapangan kerja saat ini dan ketepatan waktu pembelian barang tahan lama yang masih disikapi secara pesimis yaitu dengan nilai indeks 74 dan 55. Sedangkan empat komponen lainnya sudah berada level optimis (indeks di atas 100) yaitu kondisi penghasilan saat ini lebih baik dibandingkan enam bulan lalu, kondisi ekspektasi penghasilan 6 bulan *yad* terus disikapi secara optimis, kondisi perkiraan lapangan kerja enam bulan *yad*, dan ekspektasi kondisi ekonomi enam bulan *yad* diperkirakan membaik.

Grafik 1.4
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)



Sumber Data : BPS Propinsi NTB, diolah

1.2.3. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Trend pertumbuhan PMTB yang sempat menyentuh titik terendah pada triwulan IV tahun lalu sebesar -0,33% telah menunjukkan perkembangan positif sepanjang tahun 2006.

Pada triwulan ini pertumbuhan PTMB menyentuh level 5,33% (y-o-y) dengan kecenderungan meningkat pada periode mendatang setelah sebelumnya menyentuh level terendah selama 2006 sebesar 4,17%. Peningkatan pertumbuhan PMTB yang cukup tinggi pada triwulan IV-2006 terhadap triwulan sebelumnya diperkirakan dipicu oleh peningkatan aktivitas konstruksi yang mempunyai peranan terbesar dalam komponen PMTB. Pola kegiatan konstruksi baik oleh pemerintah maupun masyarakat meningkat cukup tajam pada triwulan ini.

Sementara itu, realisasi investasi swasta masih berada dalam kondisi stagnan. Hingga triwulan IV-2006, belum terdapat realisasi investasi, baik Penanaman Modal Asing maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (sumber : BKPM Propinsi NTB).

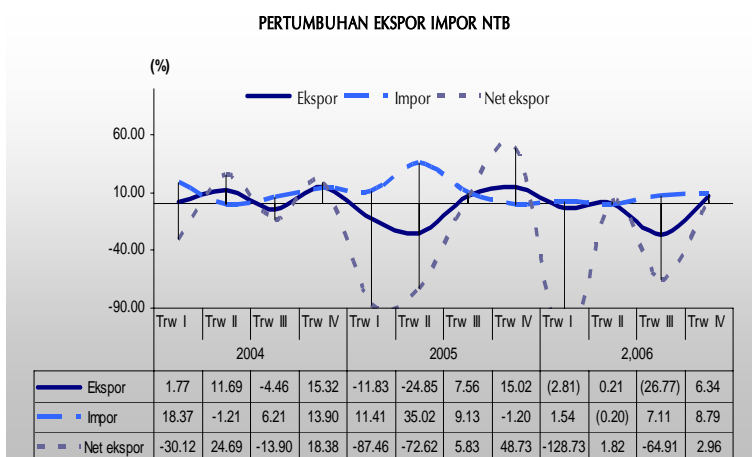
1.2.4. Pertumbuhan Net Ekspor (Ekspor – Impor) Regional & Internasional

Kegiatan ekspor di Provinsi NTB selama triwulan IV-2006 mengalami pertumbuhan sebesar 6,34% terhadap triwulan yang sama tahun sebelumnya, sedangkan terhadap triwulan sebelumnya

ekspor NTB mengalami peningkatan sebesar 29,61%. Meningkatnya pertumbuhan ekspor pada triwulan ini dibandingkan triwulan sebelumnya terutama disebabkan karena peningkatan ekspor komoditi konsentrat tembaga.

Di sisi lain, ekspor antar daerah (region) pada triwulan ini juga mengalami peningkatan sebesar 11,60% dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Sedangkan terhadap triwulan III-2006, ekspor antar daerah mengalami pertumbuhan negatif sebesar -4,14%. Menurunnya aktifitas perdagangan antar daerah pada triwulan IV dibandingkan triwulan sebelumnya disebabkan karena aktivitas sektor pertanian yang menurun di triwulan IV-2006. Sebagaimana dimaklumi bahwa komoditi perdagangan yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Barat didominasi oleh komoditi-komoditi hasil pertanian.

Grafik 1.5



Sumber Data : BPS Propinsi NTB, diolah

Komponen impor pada triwulan IV-2006 diperkirakan mengalami pertumbuhan positif sebesar 8,79% terhadap triwulan yang sama tahun sebelumnya, sedangkan terhadap triwulan sebelumnya sedikit mengalami penurunan dengan pertumbuhan negatif sebesar -0,52%. Peningkatan komponen impor tersebut lebih dipengaruhi oleh kondisi perekonomian yang

semakin stabil dan karena peningkatan daya beli masyarakat. Secara keseluruhan neraca perdagangan daerah Nusa Tenggara Barat masih mengalami surplus

1.2.5. Kinerja Ekspor - Impor Luar Negeri Propinsi NTB

Pada bagian ini, kinerja ekspor impor dibahas dari sudut pandang yang berbeda yakni dilihat dari nilai transaksi berbeda dengan konsep nilai tambah dalam PDRB. Data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi NTB menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan atas volume dan nilai ekspor Prop NTB pada periode ini dibandingkan triwulan sebelumnya.

Volume ekspor yang dihimpun dari data Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang berasal dari pengiriman barang dari Prop NTB ke luar negeri melalui beberapa pelabuhan dan bandara di Indonesia menunjukkan peningkatan sebesar 58%(q-t-q) mencapai 687,36 ton. Jumlah tersebut ekuivalen dengan USD1,318 juta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 99,39% ekspor merupakan ekspor produk konsentrat tembaga yang dihasilkan oleh PT. Newmont Nusa Tenggara. Harga komoditi ini

mengalami peningkatan yang disebabkan kenaikan harga komoditi tersebut di pasar internasional.

Hingga triwulan IV-2006 perkembangan ekspor NTB menunjukkan Jepang sebagai importir terbesar dengan nilai ekspor mencapai USD483,79 juta, diikuti Korea (US\$ 175.02 juta), Philipina (US\$ 50.57 juta), Jerman (US\$ 44.68 juta), dan sisanya ke negara lainnya seperti Inggris, India, Hongkong, Spanyol, Amerika, Perancis dan Singapura. Produk utama yang diekspor adalah konsentrat tembaga. Hingga saat ini, konsentrat tembaga masih secara konsisten mendominasi dengan ekspor NTB. Selebihnya adalah produk mutiara, mangan dan produk-produk kerajinan.

Sebagian besar produk ekspor dari NTB dikirimkan melalui pelabuhan Benete – Sumbawa. Produk yang diekspor melalui pelabuhan ini adalah konsentrat tembaga dari PT. Newmont Nusa Tenggara yang berlokasi di Pulau Sumbawa. Selain Benete, pengiriman barang ekspor juga dikirim melalui pelabuhan lainnya seperti Pelabuhan Tanjung Perak – Surabaya, Bandar Udara Selaparang – NTB, Bandara Soekarno Hatta dan Laju - Bima.

Tabel 1.2

Negara Tujuan Ekspor terbesar dan Pelabuhan Muat Ekspor NTB Januari - Desember 2006					
Negara	Nilai (US\$)	Pangsa (%)	Pelabuhan/ Bandara	Nilai (US\$)	Pangsa (%)
Jepang	483,785,618.98	59.65	Benete - Sumbawa, NTB	1,304,873,565.74	160.90
Korea	175,016,702.04	21.58	Tanjung Perak - Surabaya	1,835,055.28	0.23
Philipina	50,568,104.93	6.24	Selaparang - NTB	4,495,337.51	0.55
Jerman	44,682,072.73	5.51	Soekarno Hatta	641,192.00	0.08
Negara lainnya (23 negara)	56,950,541.04	7.02	Laju - Bima	106,804.47	0.01
Total Ekspor	811,003,039.72	100.00	Total Ekspor	1,311,951,955.00	161.77

Sumber Data : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi NTB

Data dari Disperindag Prop NTB menunjukkan masih rendahnya nilai ekspor dari sektor pertanian (dalam arti luas), padahal potensi yang dimiliki NTB disektor ini sangat besar. Hal ini menunjukkan bahwa potensi yang dimiliki daerah ini seperti potensi peternakan sapi dan kerbau, hasil laut lainnya di luar mutiara dan rumput, hasil pertanian seperti jagung dan hasil perkebunan seperti tembakau dan jarak belum sepenuhnya diolah secara optimal. Selain itu, belum adanya pelabuhan laut internasional di NTB menyebabkan hasil ekspor non migas tidak dapat dikapalkan langsung ke negara tujuan.

Bila dibandingkan dengan nilai ekspor luar negeri NTB, hingga triwulan keempat tahun 2006, realisasi impor luar negeri NTB masih di bawah nilai ekspor. Oleh karena itu, NTB terus mengalami surplus perdagangan yang relatif besar. Berdasarkan PIB dari Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Mataram yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi NTB, pada triwulan ini realisasi impor NTB hanya sebesar Rp 162,57 juta.

Tabel 1.3

Realisasi Impor NTB Januari s.d Desember 2006				
No.	Negara Asal	Komoditi	Importir	Nilai (Rp)
1	Australia	Newmont Employee Back Pack	PT. Newmont Nusa Tenggara	12,259,159
2	Singapura	Capsium Seeds	PT. Agrindo Nusantara	12,577,369
3	Singapura	Spareparts for Motor Cycle	CV. Blue Coral Diving	13,350,955
4	Singapura	Spareparts for Motor Cycle	CV. Blue Coral Diving	5,059,189
5	Singapura	Spareparts for Motor Cycle	CV. Blue Coral Diving	10,892,521
6	Singapura	Spareparts for Motor Cycle	CV. Blue Coral Diving	21,195,290
7	USA	Spareparts for Motor Cycle	CV. Blue Coral Diving	9,118,796
8	Taiwan/Cina	Spareparts for Motor Cycle	CV. Blue Coral Diving	78,114,089
Total				162,567,368

Sumber Data : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi NTB

1.3. PDRB MENURUT SISI SEKTORAL (PENAWARAN)

1.3.1. Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi Propinsi NTB

Dalam tempo setengah dasawarsa terakhir, perekonomian propinsi NTB secara rata-rata telah tumbuh sebesar 4,13%. Pertumbuhan tertinggi dialami pada tahun 2001 yang sempat menyentuh level 7,32%, namun kemudian terus menurun dan menyentuh level terendah di tahun 2005 sebesar 2,17% yang sebagian besar merupakan dampak dari kenaikan harga BBM.

Tabel 1.4
Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi Propinsi NTB

SEKTOR	Pertumbuhan (y-o-y)						Rata-rata
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	
Pertanian	-0.02	0.61	4.63	2.73	2.81	2.00	2.13
Pertambangan	20.40	3.49	0.25	8.88	(3.98)	(5.42)	3.94
Industri	5.67	5.88	6.49	6.35	7.29	6.35	6.34
Listrik	9.06	7.04	3.13	8.07	4.06	5.68	6.17
Bangunan	4.47	4.59	5.86	5.61	5.31	5.16	5.17
Perdagangan	6.62	5.27	5.14	6.78	6.22	7.55	6.26
Pengangkutan	4.27	6.64	5.80	6.70	7.22	6.77	6.23
Kuangan	7.35	10.23	20.89	16.14	5.70	5.30	10.94
Jasa-Jasa	0.59	1.72	1.58	5.16	4.01	2.27	2.56
PDRB	7.32	3.34	3.87	6.41	2.17	1.65	4.13

Sumber Data : BPS Propinsi NTB, diolah

Sepanjang 2006, perekonomian NTB mulai pulih dan menunjukkan kinerja pertumbuhan yang membaik mencapai sebesar 4,35% (y-o-y tidak termasuk pertambangan non migas). Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan merupakan sektor yang mengalami pertumbuhan rata-

rata tertinggi sebesar 19,94% selama 5 tahun terakhir. Mencermati kondisi pada triwulan IV-2006, terdapat 3 sektor yang tumbuh di atas rata-rata yakni, sektor perdagangan, hotel & restoran, sektor pengangkutan & komunikasi dan sektor industri pengolahan. Sementara itu sektor lainnya tumbuh pada kisaran rata-rata pertumbuhan 2-6%.

1.3.2. Pertumbuhan Ekonomi Propinsi NTB ditinjau Secara Tahunan (y-o-y)

Menutup 2006, perekonomian Propinsi NTB mencatat pertumbuhan moderat sebesar 4,35%. Penggerak utama roda perekonomian terutama pada sektor perdagangan, hotel dan restoran yang mencatat pertumbuhan tertinggi mencapai 8,59% y-o-y) serta mampu memberikan kontribusi tertinggi pada pertumbuhan PDRB NTB sebesar 1,21%. Pertumbuhan yang terjadi juga ditunjang pertumbuhan seluruh sektor lainnya seperti sektor pertambangan dengan kontribusi pertumbuhan PDRB 1,12% yang mencatat pertumbuhan 4,10%. Sektor keuangan, persewaan & jasa perusahaan, sektor pengangkutan & komunikasi, sektor listrik, gas & air bersih serta sektor industri pengolahan merupakan sektor-sektor lainnya yang turut mendorong geliat perekonomian dengan laju pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5-7%.

Tabel 1.5
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (ADH Konstan Th.2000)

SEKTOR	TRW IV-2005				TRW III-2006				TRW IV-2006			
	NILAI	DISTR	GROWTH	SUMBG	NILAI	DISTR	GROWTH	SUMBG	NILAI	DISTR	GROWTH	SUMBG
	(Miliar Rp)	(%)	y-o-y (%)	(%)	(Miliar Rp)	(%)	y-o-y (%)	(%)	(Miliar Rp)	(%)	y-o-y (%)	(%)
Pertanian	957.61	22.96	3.85	0.95	1,293.17	28.89	2.48	0.73	974.79	22.35	1.79	0.44
Pertambangan	1,064.34	36.62	4.97	1.35	1,207.57	26.97	5.65	1.51	1,107.94	37.79	4.10	1.12
Industri	191.02	3.62	2.49	0.12	185.36	4.14	6.73	0.27	200.66	3.59	5.05	0.25
Listrik	12.06	0.41	3.73	0.01	12.21	0.27	4.75	0.01	12.89	0.37	6.85	0.02
Bangunan	269.05	5.88	5.13	0.35	308.18	6.88	4.29	0.30	277.58	5.62	3.17	0.22
Perdagangan	549.50	11.07	3.03	0.43	582.76	13.02	7.05	0.90	596.72	11.67	8.59	1.21
Pengangkutan	286.38	7.10	7.44	0.53	301.43	6.73	6.38	0.42	306.65	6.32	7.08	0.52
Keuangan	176.88	3.75	4.77	0.22	184.64	4.12	6.15	0.25	186.74	3.81	5.58	0.25
Jasa-Jasa	380.73	8.58	3.15	0.31	401.63	8.97	3.25	0.30	392.84	8.49	3.18	0.31
Total	3,887.57	100.00	4.29	4.29	4,476.94	100.00	4.69	4.69	4,056.81	100.00	4.35	4.35

Sumber Data : BPS Propinsi NTB, diolah

1.3.3. Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha

1.3.3.1. Kondisi Dunia Usaha

Gambaran umum mengenai sektor riil yang diperoleh dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) triwulan IV-2006 yang dilakukan terhadap 60 perusahaan mengindikasikan terjadinya penurunan kegiatan usaha dibandingkan triwulan sebelumnya dengan indeks -5,92%. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh menurunnya produksi. Hal ini seperti diungkapkan oleh

responden yang bergerak di sektor pertanian. Menurunnya produksi tentunya akan berpengaruh terhadap turunnya persediaan hasil panen.

Ditinjau secara sektoral, hanya sektor pertanian yang mengindikasikan penurunan (indeks -14,95%). Penurunan kegiatan usaha pada sektor pertanian sebagai akibat turunnya kegiatan usaha pada sub sektor tanaman bahan makanan (-13,87). Sementara itu, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas & air bersih, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel & restoran serta sektor pengangkutan & komunikasi mengalami peningkatan kegiatan usaha.

Penurunan kegiatan usaha di sektor pertanian disebabkan karena pada triwulan ini petani baru memulai masa tanam, terutama komoditi padi seiring dengan tibanya musim hujan. Adapun indikator yang membatasi kegiatan usaha di sektor ini adalah gangguan alam/cuaca, di mana kegiatan sektor pertanian sangat tergantung pada kondisi alam.

Di lain sisi, peningkatan kegiatan usaha di sektor lainnya seperti pada sektor perdagangan, hotel & restoran pada triwulan IV-2006 yang mengalami peningkatan dengan SBT 3,72% dipicu oleh peningkatan permintaan yang berdampak pada nilai penjualan yang semakin meningkat pula. Peningkatan kegiatan sektor ini terutama terjadi pada subsektor perdagangan besar & eceran dengan SBT 4,28%. Responden sektor perdagangan, hotel & restoran menyatakan bahwa meningkatnya kegiatan usaha dipengaruhi oleh tibanya bulan puasa dan hari raya Idul Fitri pada triwulan ini. Pada triwulan I-2007 mendatang, para pengusaha umumnya memperkirakan akan terjadi peningkatan kegiatan usaha seperti tercermin pada indeks 14,05.

Tabel 1.6
 Nilai Balance Score Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha

Sektor	TRW IV-05		TRW III-06		TRW IV-06	
	Keg. Usaha	Situasi Bisnis	Keg. Usaha	Situasi Bisnis	Keg. Usaha	Situasi Bisnis
Umum	-5.00	15.00	-8.33	23.33	-11.67	33.33
Pertanian	-9.52	28.57	-47.62	23.81	-42.86	28.57
Pertambangan	-100.00	-50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Industri	0.00	-25.00	-25.00	25.00	25.00	25.00
Listrik	-50.00	0.00	0.00	100.00	50.00	100.00
Bangunan	0.00	0.00	16.67	0.00	0.00	0.00
Perdagangan	9.09	18.18	36.36	18.18	0.00	36.36
Pengangkutan	14.29	28.57	0.00	42.86	0.00	57.14
Keuangan	100.00	50.00	100.00	100.00	0.00	50.00
Jasa-Jasa	-40.00	0.00	-20.00	-20.00	0.00	40.00

Sumber Data : Hasil Survei SKDU BI-BPS Prop.NTB

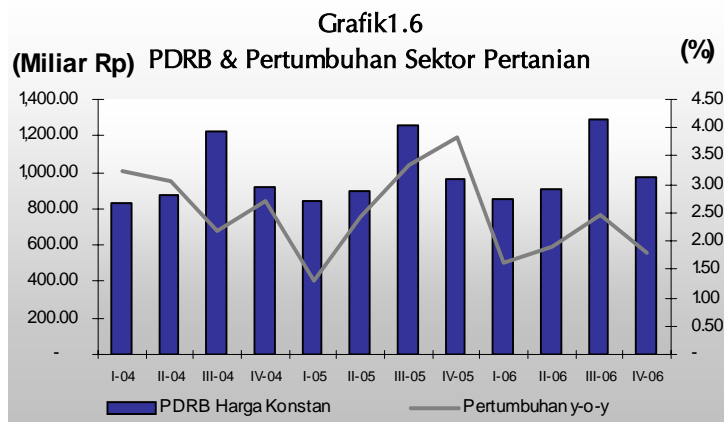
1.3.3.2. Penggunaan Tenaga Kerja

Pada triwulan ini, penggunaan tenaga kerja secara umum di NTB cenderung stabil, ditunjukkan oleh sebagian besar responden (66,67%) dunia usaha yang menyatakan bahwa mereka tidak akan mengurangi atau menambah jumlah karyawannya. Hanya sebagian kecil yang berkeinginan mengurangi atau menambah jumlah tenaga kerjanya. Optimisme penambahan tenaga kerja teridentifikasi berasal dari sektor pertanian, sektor bangunan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sedangkan sikap pesimis pengurangan tenaga kerja terjadi pada sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, sektor pengangkutan dan komunikasi dan sektor listrik, gas dan air bersih yang dilatarbelakangi berbagai masalah yang terjadi di sektor tersebut akhir-akhir ini.

1.3.4. Tinjauan Pertumbuhan Ekonomi Secara Sektoral

1.3.4.1. Sektor Pertanian

Pada triwulan IV-2006 sektor pertanian mengalami kontraksi dengan pertumbuhan sebesar -24,62 % jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Turunnya pertumbuhan sektor ini disebabkan turunnya pertumbuhan semua sub sektor, dengan penurunan tertinggi terjadi pada sub



Sumber Data : BPS Propinsi NTB, diolah

sektor perikanan dan sub sektor tanaman perkebunan yang turun masing-masing sebesar -42,0% dan -39,86%. Rendahnya pertumbuhan sub sektor perkebunan disebabkan tidak adanya panen tanaman perkebunan terutama tanaman tembakau pada triwulan ini.

Terhadap triwulan yang sama tahun sebelumnya, hampir semua sub sektor mengalami peningkatan. Secara total sektor

pertanian mampu tumbuh sebesar 1,79%, dengan peningkatan terjadi pada hampir semua sub sektor kecuali sub sektor kehutanan yang mengalami pertumbuhan negatif sebesar -1,77%. Hal ini mengindikasikan jika dibandingkan tahun sebelumnya pada periode waktu yang sama, perekonomian Nusa Tenggara Barat mengalami kemajuan pada sektor pertanian.

Sementara itu, kontraksi yang terjadi pada sub sektor tanaman bahan makanan diperkirakan terjadi akibat gangguan *supply* beras. Gangguan tersebut merupakan dampak dari kekeringan yang terjadi di beberapa wilayah NTB, terutama di sebagian wilayah Pulau Sumbawa. Kondisi tersebut

diperburuk dengan sistem pengairan sawah sebagian besar masyarakat NTB yang masih sangat tergantung pada hujan. Hanya sedikit yang telah memanfaatkan sistem irigasi.

Namun demikian, NTB memiliki potensi tinggi pada sub sektor ini dengan tingginya permintaan komoditas seperti jagung, kedelai dan kacang tanah dari dalam dan luar negeri. Lahan pengembangan kedelai terkonsentrasi di Kab. Lombok Tengah, Sumbawa, Bima dan Dompu. Sedangkan jagung dan kacang tanah relatif tersebar merata di seluruh wilayah NTB.

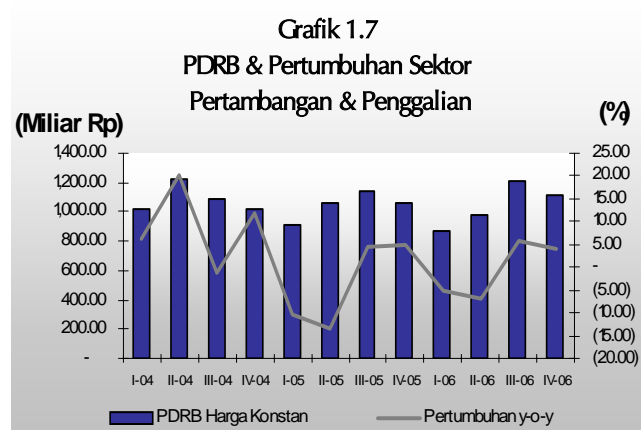
Potensi sektor pertanian juga terdapat pada sub sektor peternakan yang secara konsisten mengalami peningkatan permintaan hasil ternak dari dalam negeri (Kalimantan, Jawa, Sulawesi) dan luar negeri (Venezuela, Malaysia dan Timor Leste). Namun tingginya permintaan tersebut belum seluruhnya dapat dipenuhi peternak di NTB. Sehingga peluang pertumbuhan di sub sektor ini masih terbuka lebar.

1.3.4.2. Sektor Pertambangan dan Penggalian

Pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian pada triwulan IV-2006 mengalami peningkatan baik terhadap triwulan sebelumnya maupun terhadap triwulan yang sama tahun sebelumnya, dengan peningkatan masing-masing sebesar 11,21% dan 4,10%. Ini disebabkan oleh trend produksi sub sektor pertambangan non migas (produksi konsentrat tembaga) yang mengalami peningkatan pada akhir triwulan berjalan.

Dengan angka pertumbuhan tersebut, sektor ini memberikan kontribusi paling tinggi pada periode ini sebesar 1,12%.

Tingginya kontribusi tersebut juga disebabkan karena dominannya pangsa sektor ini terhadap PDRB NTB. Pertumbuhan yang terjadi didorong oleh peningkatan produksi PT. Newmont Nusa Tenggara yang menghasilkan konsentrat tembaga.

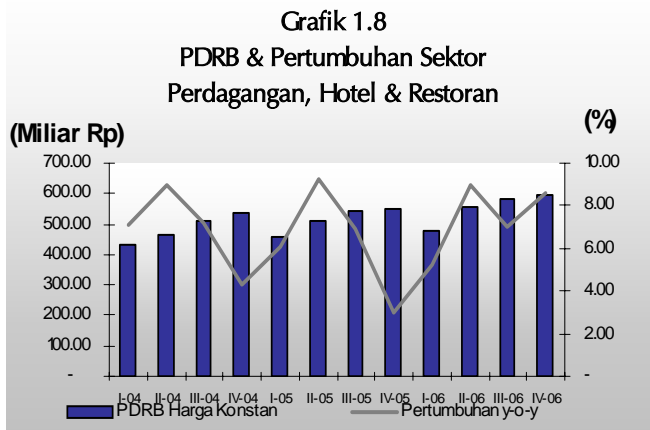


Sumber Data : BPS Propinsi NTB, diolah

1.3.4.3. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran

Pada triwulan IV-2006 sektor perdagangan, hotel & restoran mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya maupun terhadap triwulan yang sama tahun sebelumnya. Terhadap triwulan sebelumnya, sektor ini tumbuh sebesar 2,40%, di mana pertumbuhan ini diakibatkan meningkatnya pertumbuhan sub sektor perdagangan besar & eceran sebagai cerminan adanya beberapa hari besar/hari raya pada triwulan ini.

Sementara terhadap triwulan yang sama tahun sebelumnya, sektor ini tumbuh sebesar



Sumber Data : BPS Propinsi NTB, diolah

8,59% dan menjadi kontributor terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi di NTB sebesar 1,21%. Sumbangan terbesar 1,13% diberikan oleh sub sektor perdagangan besar dan eceran, sementara sisanya berasal dari sub sektor hotel dan restoran.

Pertumbuhan sub sektor perdagangan besar dan eceran didorong oleh peningkatan permintaan terhadap barang-barang kebutuhan masyarakat

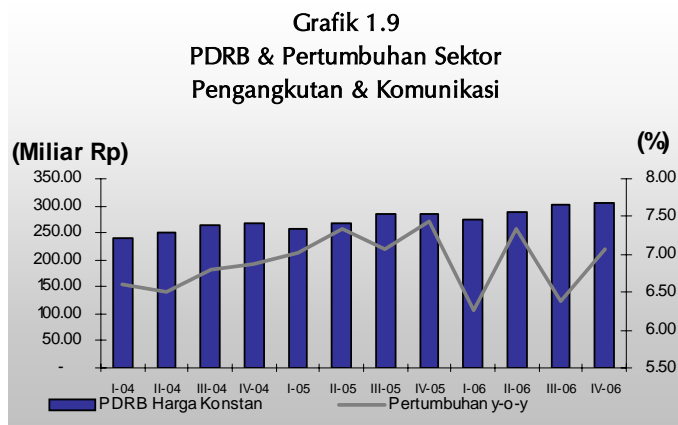
(terutama barang-barang konsumsi) seiring dengan tibanya hari raya keagamaan di triwulan ini.

Pertumbuhan sub sektor hotel dan restoran dipengaruhi oleh tingkat kunjungan wisatawan ke NTB yang semakin meningkat. Ajang promosi potensi wisata seperti Festival Senggigi di awal 2006 mampu menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara untuk berkunjung ke Lombok. Dinas Budaya & Pariwisata NTB sendiri menargetkan pertumbuhan wisatawan sebesar 5% per tahun. Selama 4 tahun terakhir jumlah wisatawan ke NTB terus mengalami peningkatan mencapai 246 ribu wisatawan.

Tempat yang paling banyak dikunjungi wisatawan di Lombok Barat adalah Senggigi, Gili Terawang, dan tempat lainnya seperti Gili Meno, Gili Air, Tanjung, Narmada, Sekotong dan Bayan. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh langsung terhadap peningkatan aktivitas di sub sektor hotel dan restoran.

1.3.4.4. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi

Pada triwulan IV-2006 sektor pengangkutan dan komunikasi menunjukkan pertumbuhan sebesar 1,73% terhadap triwulan sebelumnya. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh peningkatan beberapa sub sektor, seperti pada sub sektor angkutan udara dan sub sektor angkutan laut yang mengalami peningkatan permintaan pada saat bulan puasa dan hari raya Idul Fitri.

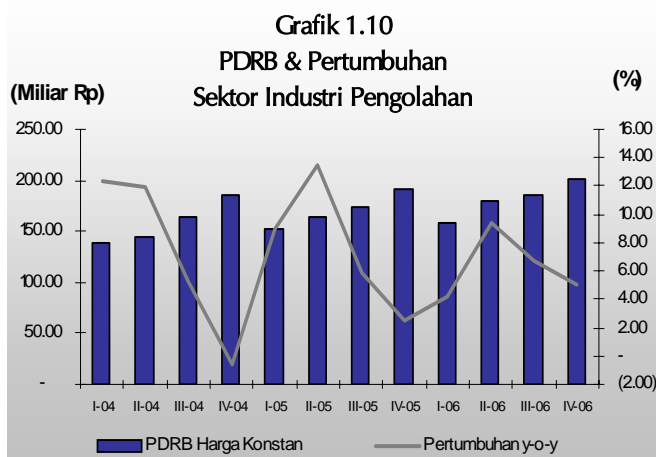


Sumber Data : BPS Propinsi NTB, diolah

Demikian pula terhadap triwulan yang sama, sektor ini mengalami peningkatan hingga 7,08% yang disebabkan meningkatnya pertumbuhan semua sub sektor. Hingga triwulan IV 2006, sektor pengangkutan dan komunikasi telah tumbuh sebesar 7,08% (yoy) dan menyumbang 0,52% terhadap pertumbuhan ekonomi NTB yang merupakan sumbangan ketiga terbesar setelah sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor pertambangan & penggalian. Selama 3 tahun terakhir, angka pertumbuhan sektor ini secara konsisten berada di atas 5%.

Peningkatan aktivitas perdagangan antar daerah menggunakan jalur darat dan laut turut mendorong pertumbuhan pesat di sektor ini. Selain itu, pertumbuhan yang terjadi juga dipicu oleh meningkatnya kebutuhan barang-barang konsumsi yang didatangkan dari luar NTB.

1.3.4.5. Sektor Industri Pengolahan



Sumber Data : BPS Propinsi NTB, diolah

Dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya, sektor industri pengolahan menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 5,05% dengan nilai PDRB pada triwulan berjalan Rp200,66 miliar. Namun kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi NTB secara keseluruhan relatif kecil hanya 0,25%.

Sepanjang 2006, sektor ini sempat menyentuh pertumbuhan tertinggi dibandingkan sektor lainnya pada pertengahan tahun mencapai sebesar 9,43%. Beberapa kegiatan yang berskala nasional yang diselenggarakan di NTB merupakan salah satu faktor pendorong meningkatnya permintaan terhadap hasil produksi industri kecil dan menengah di NTB.

1.3.4.6. Sektor Lainnya

Pada triwulan IV-2006 sektor listrik, gas & air bersih mengalami pertumbuhan sebesar 5,56% (terhadap triwulan sebelumnya), dan meningkat 6,85% terhadap triwulan yang sama tahun sebelumnya. Pola ini juga terjadi pada sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan yang tumbuh 1,14% terhadap triwulan sebelumnya, dan terhadap triwulan yang sama tahun sebelumnya tumbuh sebesar 5,58%.

Pola yang berbeda ditunjukkan oleh sektor bangunan dan sektor jasa-jasa, di mana sektor ini mengalami pertumbuhan negatif masing-masing sebesar -9,93% dan -2,19% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, namun jika dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya pertumbuhan sektor ini masing-masing sebesar 3,17% dan 3,18%. Pertumbuhan positif di sektor

bangunan pada periode ini dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sangat dipengaruhi realisasi proyek-proyek pemerintah yang didanai APBD.

Sementara itu, sektor listrik, gas dan air bersih hingga triwulan ini masih belum memberikan kontribusi yang berarti terhadap pertumbuhan PDRB NTB. Pada triwulan ini, sektor listrik, gas dan air bersih hanya menyumbang 0,02% terhadap perekonomian NTB. Namun demikian, bila dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya, sektor ini telah tumbuh cukup pesat mencapai 6,85% seiring dengan investasi oleh PT PLN di sub sektor listrik dengan ekspansi yang dilakukannya di Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Bima (Kecamatan Wera).

Peningkatan aktivitas perekonomian pada triwulan ini telah mendorong pertumbuhan di sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan mencapai 5,58%. Dengan pertumbuhan tersebut, kontribusi sektor ini hanyalah sebesar 0,25% terhadap perekonomian NTB. Sedangkan sektor jasa-jasa pada triwulan ini hanya tumbuh sebesar 3,18% dan hanya memberikan sumbangan sebesar 0,31%. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, sektor ini mengalami sedikit peningkatan pertumbuhan dari sebesar 3,15%.

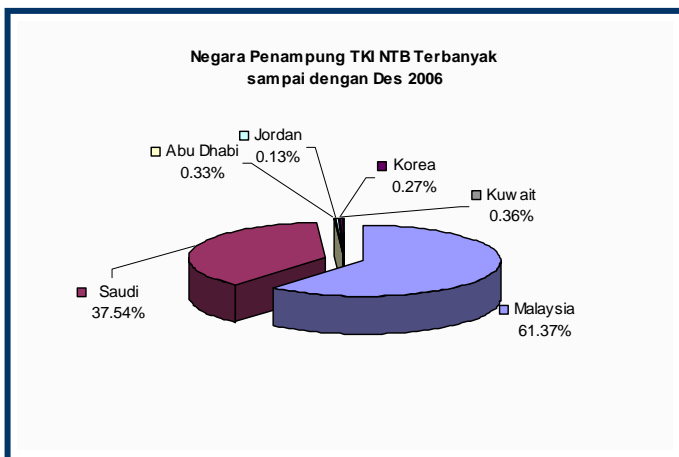
1.4. TENAGA KERJA KE LUAR NEGERI

Dengan sumbangan *remittance* yang cukup besar, tenaga kerja Indonesia asal Prop NTB memiliki peran penting dalam menggerakkan roda perekonomian daerah. Prop NTB selama ini

dikenal sebagai penyalur TKI terbesar, ditandai juga dengan menjamurnya lembaga PJTKI di propinsi ini. Di sisi lain, banyaknya angkatan kerja yang beralih menjadi TKI telah menyebabkan berkurangnya tenaga produktif di sektor pertanian di NTB.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun dari Dinas Tenaga Kerja, pada triwulan ini jumlah TKI asal NTB yang ditempatkan bekerja di luar negeri mencapai 10.730 orang.

Grafik 1.11



Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Propinsi NTB, diolah

Sebagian besar TKI asal NTB tersebut bekerja di Malaysia, dengan jumlah TKI mencapai 6.381 orang atau ekuivalen 61,37% dari total TKI asal NTB. Di urutan kedua terbesar negara penampung TKI asal NTB adalah Saudi Arabia dengan jumlah TKI sebanyak 4.337 orang (37,54%) dan sebagian kecil sisanya ditempatkan di Kuwait, Abu Dhabi, Jordan dan Korea.

Dari penempatan TKI tersebut sampai dengan triwulan IV-2006, jumlah *remittance* yang masuk ke NTB mencapai Rp 435,50 miliar (triwulan IV-Rp 69,88 miliar). Pada triwulan ini, Saudi Arabia memberikan kontribusi *remittance* tertinggi sebesar Rp 36,43 miliar (50,48%). Malaysia, meskipun sebagai negara terbesar penampung TKI NTB, memberikan kontribusi *remittance* tertinggi kedua setelah Saudi Arabia, dengan *remittance* sebesar Rp 30,97 miliar (47,62%). Selain kedua negara tersebut, Kuwait, Singapura, Jepang, Qatar, Brunei, Hongkong, Jordan dan UEA serta beberapa negara lainnya juga berperan menyumbangkan *remittance*. meskipun tidak cukup signifikan.

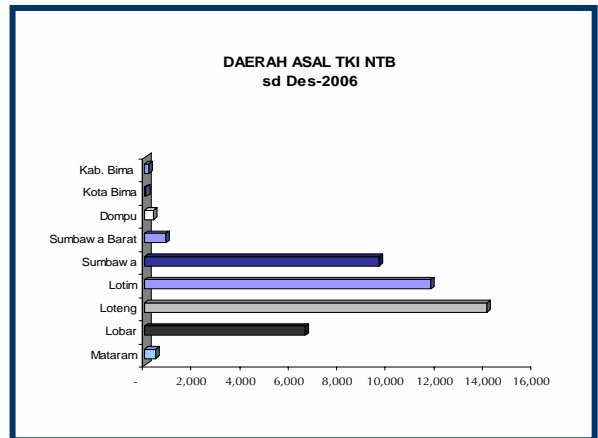
Sementara itu seperti triwulan yang lalu, TKI asal NTB yang bekerja di luar negeri untuk pekerja laki-laki pada triwulan ini masih lebih banyak dibandingkan dengan perempuan, dengan perbandingan 58,49% dan 41,51%. Lowongan yang tersedia pada periode ini sendiri terbatas sebagai pembantu rumah tangga, petani perkebunan, konstruksi, peternak dan pengemudi.

Pada triwulan ini, jumlah TKI NTB yang bekerja di sektor formal lebih banyak dibandingkan sektor informal. Di sektor formal dipekerjakan sekitar 6.371 orang (59,38%), sedangkan yang bekerja di sektor informal hanya 4.359 orang (40,62%). Dengan demikian, porsi jumlah pekerja di sektor informal pada periode ini menurun dibandingkan triwulan sebelumnya, sedangkan yang bekerja di sektor formal mengalami peningkatan.

Pada umumnya, TKI yang dikirim ke luar negeri memiliki latar belakang pendidikan yang rendah, tercermin dari mayoritas pendidikannya adalah lulusan SD (60%), SLTP (35,52%) dan SLTA (4,48%). Tidak ada satupun tenaga kerja dari lulusan DIII dan S1.

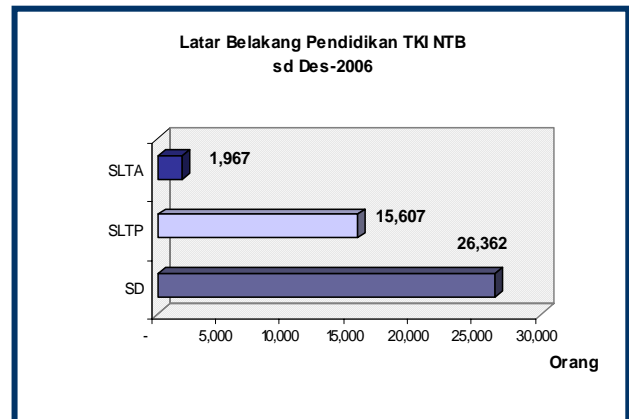
Hal ini mencerminkan bahwa sebagian besar tenaga kerja dari NTB belum memiliki pengetahuan yang memadai. Hal ini pulalah yang menyebabkan tenaga kerja yang bekerja di sektor informal relatif besar jumlahnya.

Grafik 1.12



Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Propinsi NTB, diolah

Grafik 1.13



Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Propinsi NTB, diolah

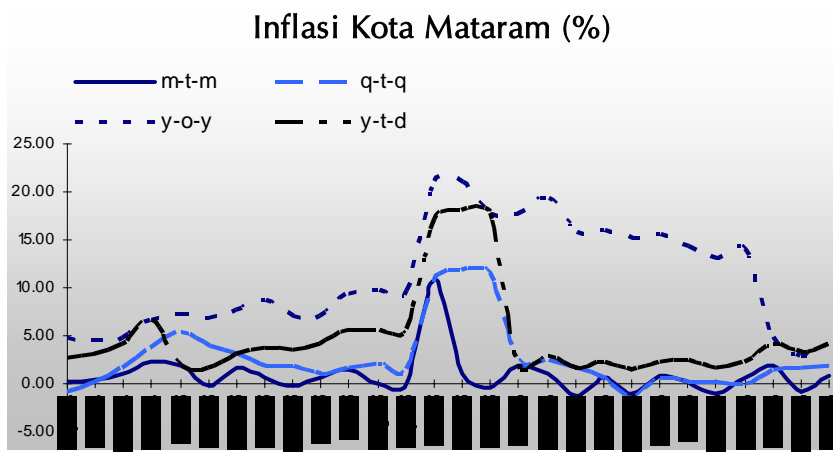
BAB II EVALUASI PERKEMBANGAN INFLASI NUSA TENGGARA BARAT

2.1 GAMBARAN UMUM INFLASI DI PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

Harga barang-barang di kota Mataram pada triwulan keempat tahun 2006 mengalami peningkatan. Peningkatan terjadi baik secara bulanan (m-t-m), triwulanan (q-t-q), tahunan (y-o-y) maupun kumulatif (y-t-d). Secara kumulatif dibandingkan akhir tahun 2006, kota Mataram mengalami inflasi yang relatif moderat sebesar 4,16%. Bila dibandingkan dengan akhir triwulan sebelumnya, inflasi kota Mataram meningkat mencapai 1,93% walaupun secara bulanan hanya mengalami inflasi rendah sebesar 0,90%.

Trend pergerakan inflasi tampak stabil dengan kecenderungan menurun sejak akhir tahun 2005. Lonjakan tajam pada akhir tahun 2005 diperkirakan sudah terlewati dengan cukup baik dan

Grafik 2.1



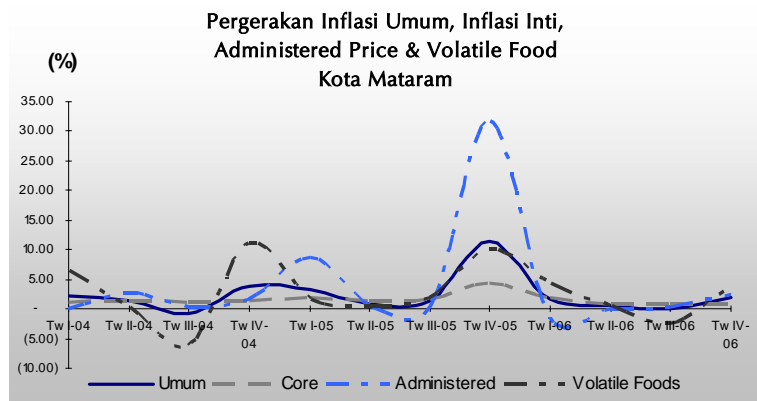
perekonomian mulai menggeliat dengan stimulus inflasi yang relatif stabil. Kondisi perekonomian yang relatif stabil di penghujung 2006 turut mendorong pertumbuhan positif perekonomian pada triwulan berjalan mencapai 4,35% (y-o-y).

2.2 INFLASI INTI, INFLASI *VOLATILE FOOD*, INFLASI *ADMINISTERED PRICE*

Dibandingkan triwulan sebelumnya, inflasi di Kota Mataram masih didominasi pergerakan inflasi inti, diikuti oleh inflasi *volatile food* dan inflasi *administered price*. Peranan masing-masing terhadap inflasi Kota Mataram sebesar 54,90%; 26,88% dan 18,22%. Walaupun pada triwulan keempat tahun yang lalu inflasi *administered price* dan *volatile food* merupakan penyebab utama terjadinya fluktuasi tajam inflasi.

Grafik 2.2

Kenaikan harga-harga barang pada periode ini yang mencapai 1,93% (q-t-q) terutama disebabkan oleh inflasi *volatile foods* dan *administered price* sebesar 3,61% dan 2,38% masing-masing. Sementara itu inflasi inti kota Mataram hanya mencapai 0,90% sedikit menurun dibandingkan triwulan lalu sebesar 0,97%.



Sumber : Data BPS Pusat, diolah

Inflasi pada kelompok *volatile food* pada triwulan ini terutama disebabkan oleh faktor *seasonal*. Tingginya permintaan akan bahan makanan seperti daging sapi, sayuran dan buah-buahan saat hari raya yang jatuh di periode ini tidak diimbangi *supply* yang memadai sehingga mendorong kenaikan harga pada kelompok bahan makanan tersebut. Berakhirnya musim panen pada sektor pertanian yang diindikasikan dari menurunnya aktivitas produksi di sektor tersebut serta masih rendahnya produktivitas sub sektor peternakan membuat pasokan sayuran, buah-buahan dan daging sapi lebih rendah dari peningkatan permintaan yang terjadi.

Selain itu aksi *profit taking* para pedagang dengan menaikkan harga pada hari raya turut memicu inflasi pada kelompok tersebut.. Beberapa komoditi yang mengalami inflasi antara lain jagung pipilan, cabe merah, bawang putih, daging sapi, hati sapi, ikan mujair, lele, nila, tenggiri dan beberapa komoditi lainnya.

Kenaikan tarif angkutan antar kota dan suku cadang kendaraan pada periode ini turut mendorong kenaikan harga barang pada kelompok *administered price*. Kenaikan tarif angkutan antar kota disebabkan adanya pengenaan tarif khusus seiring meningkatnya aktivitas perjalanan menjelang hari raya yang tiba pada triwulan ini.

2.3. INFLASI TRIWULANAN (Q-T-Q) KOTA MATARAM

2.3.1. Inflasi Triwulanan (q-t-q) Kota Mataram Triwulan IV-2006

Sejalan dengan jatuhnya dua hari raya pada triwulan IV-2006 yang menyebabkan peningkatan permintaan pada hampir seluruh komoditi, harga barang di kota Mataram mengalami peningkatan mencapai 1,93% setelah pada triwulan lalu mengalami deflasi -0,05%. Harga bahan makanan mengalami peningkatan tertinggi mencapai 3,65% dan menjadi kontributor tertinggi

terhadap inflasi kota Mataram sebesar 1,06%. Sementara itu tarif transpor dan komunikasi berada di urutan kedua terbesar dalam menyumbang inflasi kota Mataram mencapai sebesar 0,41% dengan rata-rata kenaikan mencapai 2,72%. Kenaikan harga barang yang terjadi pada periode ini sangat dipengaruhi faktor musiman yaitu datangnya hari raya Idul Fitri maupun Natal di penghujung 2006.

Tabel 2.1

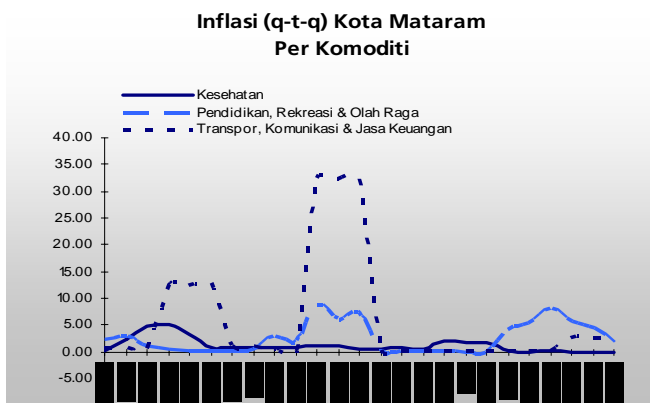
KOMODITI	Tw.3-06		Tw.4-06	
	INFLASI (q-t-q)	Sumbangan	INFLASI (q-t-q)	Sumbangan
	(%)	(%)	(%)	(%)
Bahan Makanan	-1.90	-0.56	3.65	1.06
Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	0.33	0.06	1.12	0.21
Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	0.35	0.09	0.55	0.14
Sandang	0.39	0.02	1.14	0.05
Kesehatan	0.07	0.00	-0.13	-0.01
Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga	8.31	0.33	1.68	0.07
Transpor, Komunikasi & Jasa Keuangan	0.10	0.01	2.72	0.41
	-0.05	-0.05	1.93	1.93

Sumber : Data BPS Pusat, diolah

Kelompok lainnya yang juga mengalami inflasi yakni kelompok makanan jadi, minuman dan rokok sebesar 1,12%. Kelompok ini sekaligus menjadi penyumbang inflasi ketiga tertinggi dengan sumbangan sebesar 0,21%. Masih berlanjutnya krisis energi terutama listrik serta kenaikan harga gas elpiji dan BBM industri turut mendorong kenaikan pada kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar. Sementara itu, hanya satu kelompok yang mengalami deflasi yakni kelompok komoditi kesehatan yang mengalami penurunan sebesar -0,13% dengan sub komoditi obat-obatan yang mengalami deflasi tertinggi -0,69%.

2.3.2. Trend Inflasi Triwulanan (q-t-q) Kota Mataram

Grafik 2.3



Sumber : Data BPS Pusat, diolah

Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan mengalami fluktuasi tertinggi yang disebabkan kenaikan harga BBM pada kisaran 30% di awal 2005 dan kenaikan berikutnya pada kisaran 90-100% di penghujung 2005.. Namun demikian, dampak kebijakan tersebut tidak berlangsung terlalu lama, karena sejak memasuki tahun 2006 pergerakan inflasi

kelompok tersebut telah cenderung rendah dan stabil. Pada bulan Desember 2006, inflasi kelompok ini mencapai 2,72% yang disebabkan faktor musiman seiring tibanya hari raya. Trend peningkatan juga terjadi pada kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga yang mengalami kenaikan mencapai 1,68% memasuki tahun ajaran baru di 2007.

Kelompok bahan makanan terlihat paling berfluktuasi. Hal ini disebabkan karena pengaruh faktor *seasonal* sangat signifikan terhadap pola pergerakan triwulanan kelompok ini. Dampaknya terutama dari sisi persediaan. Faktor cuaca sangat mempengaruhi musim tanam/panen dan hasil produk pertanian, karena hanya sebagian kecil saja areal pertanian di NTB yang menggunakan saluran irigasi atau air waduk.

Sub sektor perikanan juga terkena imbas faktor cuaca. Sebagian besar nelayan masih menggunakan peralatan tradisional sehingga aktivitas mereka sangat tergantung pada gelombang pasang-surut air laut.

Selain itu, naiknya harga BBM terutama jenis bensin dan solar juga cukup menghambat kegiatan pencarian ikan oleh nelayan yang menggunakan perahu bermesin. Akibatnya, faktor kondisi cuaca yang memburuk pada triwulan ini telah mendorong kenaikan inflasi kelompok bahan makanan.

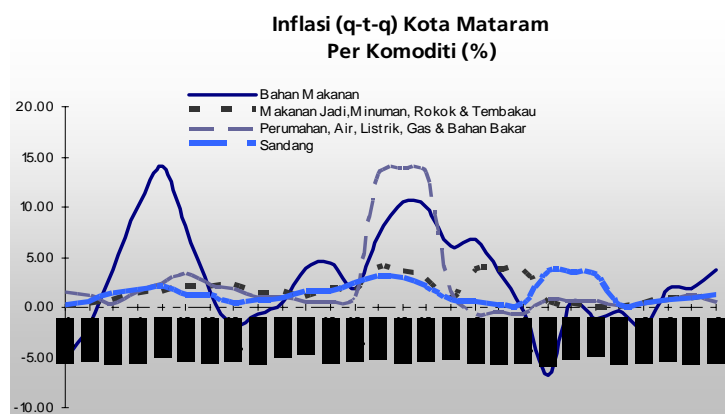
Pergerakan inflasi kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar cenderung stabil hingga periode ini, walau mengalami sedikit peningkatan di penghujung 2006. Namun sebagaimana yang dialami kelompok lainnya, memasuki tahun 2007 diperkirakan mengalami penurunan dan kembali pada *trend* normalnya. Inflasi kelompok ini sangat kecil pada triwulan ini, hanya sebesar 0,20%.

Kelompok barang sandang dan kelompok makanan jadi, minuman rokok dan tembakau menggambarkan kecenderungan yang relatif lebih stabil, dengan sedikit fluktuasi pada akhir tahun 2006. Inflasi triwulanan masing-masing kelompok tersebut adalah 1,14 dan 0,55%.

2.4. INFLASI TAHUNAN (Y-O-Y) KOTA MATARAM

Memasuki triwulan IV-2006, inflasi kota Mataram dibandingkan periode yang sama thun sebelumnya mencapai level moderat yakni 4,16% setelah pada triwulan-triwulan sebelumnya berada

Grafik 2.4



Sumber : Data BPS Pusat, diolah

di atas 10%. Kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan yang pada 3 triwulan sebelumnya mengalami inflasi tertinggi telah kembali pada pola normalnya dengan inflasi sebesar 3,18% dan menyumbang 0,48% pada inflasi y-o-y kota Mataram.

Sejalan dengan inflasi triwulanan, inflasi tahunan pada kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga cukup tinggi pada triwulan ini, sebesar 10,42%. Meskipun inflasinya cukup tinggi, sumbangan yang diberikan kelompok ini tidak terlalu besar, hanya 0,42%. Sumbangan tertinggi berasal dari kelompok bahan makanan yang mengalami inflasi 5,80% dan menyumbang 1,68% terhadap inflasi kota Mataram.

Sumbangan tertinggi kedua setelah kelompok bahan makanan diberikan oleh kelompok makanan jadi, minuman dan rokok dengan kontribusi sebesar 0,99% dari total inflasi tahunan NTB. Kelompok ini mengalami inflasi sebesar 5,52% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, dengan inflasi sebesar 5,02%, kelompok sandang memberikan sumbangan sebesar 0,22%. Kelompok lainnya yang mengalami inflasi hanya di bawah 5% adalah kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar serta kelompok kesehatan. Kontribusi yang diberikan oleh kedua kelompok tersebut tidak terlalu signifikan.

Tabel 2.2

KOMODITI	Tw.3-06		Tw.4-06	
	INFLASI (y-o-y)	Sumbangan	INFLASI (y-o-y)	Sumbangan
	(%)	(%)	(%)	(%)
Bahan Makanan	12.32	3.61	5.80	1.68
Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	7.38	1.43	5.52	0.99
Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	14.02	3.50	1.07	0.27
Sandang	5.87	0.29	5.02	0.22
Kesehatan	3.01	0.13	2.24	0.09
Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga	16.41	0.69	10.42	0.42
Transpor, Komunikasi & Jasa Keuangan	33.08	4.24	3.18	0.48
	13.89	13.89	4.16	4.16

Sumber : Data BPS Pusat, diolah

Dari kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan, komoditi yang mengalami inflasi tertinggi adalah ganti oli (31,15%), ban dalam mobil (22,45%), angkutan antar kota (24,20%), dan angkutan dalam kota (9,51%). Angkutan dalam kota merupakan penyumbang inflasi tertinggi dari kelompok ini dengan kontribusi sebesar 0,35%. Komoditi lainnya hanya menyumbang dibawah 0,5%. Dapat disimpulkan bahwa peningkatan harga komoditi tersebut sudah menyerap dampak kenaikan harga BBM pada awal dan menjelang akhir tahun 2005. Penyebab lainnya yang mendorong tingginya inflasi kelompok ini adalah meningkatnya tarif angkutan seiring dengan meningkatnya permintaan akan layanan transportasi menjelang hari raya Idul Fitri dan Natal di periode ini.

Dari kelompok bahan makanan, komoditi beras tetap menjadi penyumbang inflasi tertinggi dengan sumbangan sebesar 0,97%. Meningkatnya permintaan terhadap beras menjelang tibanya bulan ramadhan memicu kenaikan harganya di pasaran. Sementara dari sisi *supply*, kekeringan yang melanda sebagian besar wilayah Sumbawa sejak pertengahan triwulan ini menjadi penyebab utama menurunnya hasil panen NTB, terutama produksi gabah padi. Banyak petani yang mengalami gagal panen karena areal sawahnya kekurangan air. Hal disebabkan karena hanya sebagian kecil saja areal sawah di NTB yang memanfaatkan pengairan dari irigasi/waduk. Fasilitas irigasi yang memadai di NTB juga masih sangat terbatas. Kondisi kemarau panjang ini diperparah pula dengan banyaknya kawasan hutan yang mengalami kerusakan, sehingga menyebabkan daerah penyangga air menjadi lebih sempit. Disamping itu, adanya gangguan hama yang menyerang tanaman padi juga memicu penurunan produksi beras tersebut.

2.5. KOMODITI PENYUMBANG INFLASI DAN DEFLASI TERBESAR

Komoditi penyumbang inflasi terbesar di Kota Mataram pada triwulan IV-2006 (q-t-q) digambarkan pada Tabel 2.3. Angkutan dalam kota memberikan sumbangan paling tinggi pada periode ini dibandingkan periode sebelumnya sebesar 0,42% terhadap total inflasi, disusul oleh cabe merah (0,14%), beras & daging sapi(0,14%) dan seterusnya.

Tingginya sumbangan inflasi q-t-q dari kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan terutama angkutan dalam kota dipicu oleh meningkatnya permintaan terhadap layanan transportasi pada triwulan ini. Selain itu,

menyambut dua hari raya di triwulan ini permintaan masyarakat terhadap bahan makanan meningkat cukup signifikan, khususnya untuk produk sembako, termasuk pula telur dan daging .

Dari kelompok pendidikan, dengan perbandingan periode yang sama tahun 2005, pada periode ini terjadi kenaikan biaya sekolah hampir diseluruh jenjang pendidikan, baik akademi/ perguruan tinggi, SLTA, SLTP dan Sekolah Dasar. Sementara itu, adanya rencana pencabutan subsidi minyak tanah omprongan terutama bagi petani tembakau direspon lebih cepat oleh pengecer dengan menaikkan harga jualnya.

Tabel 2.3

No.	Komoditi Penyumbang Inflasi Terbesar di Kota Mataram Triwulan IV-2006	Sumbangan thd Inflasi
	Sub Komoditi	(%)
1	Angkutan Dalam Kota	0.35
2	Cabe Merah	0.14
3	Beras	0.14
4	Daging Sapi	0.14
5	Sawi Hijau	0.11
6	Bawang Putih	0.10
7	Daging Ayam Ras	0.10
8	Rokok Kretek Filter	0.09
9	Rokok Kretek	0.05
10	Angkutan Antar Kota	0.05
11	Jeruk	0.05
12	Akademi/Perguruan Tinggi	0.04

Tabel 2.4

No.	Komoditi Penyumbang Deflasi Terbesar di Kota Mataram Triwulan IV-2006	Sumbangan thd Inflasi
	Sub Komoditi	(%)
1	Bawang Merah	-0.07
2	Tomat Sayur	-0.04
3	Cabe Rawit	-0.01
4	Pisang	-0.01
5	Kembung/Gembung	-0.01
6	Semen	-0.01
7	Cumi-Cumi	-0.01
8	Sabun Detergen Bubuk	-0.01
9	Gula Merah	-0.01
10	Semangka	-0.01
11	Bedak	-0.01

Sumber : Data BPS Pusat, diolah

Dari Tabel 2.4. dapat dilihat beberapa komoditi yang mengalami deflasi. Sebagian besar merupakan hasil produk pertanian yang sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca yang mendukung kegiatan di sektor pertanian pada triwulan ini. Komoditi tersebut antara lain bawang merah (-0,07%), tomat sayur (-0,04%), sisanya menyumbang deflasi sebesar -0,01% yakni cabe rawit, pisang, dan semangka. Dari komoditi penyumbang deflasi -0,01%, terdapat beberapa komoditas diluar kelompok hasil pertanian yakni, bedak, sabun detergen bubuk, semen serta hasil perikanan (ikan gembung dan cumi-cumi)

Tabel 2.5

Perbandingan Inflasi Triwulan IV 2006	Inflasi y-o-y (%)
Kupang	9.71
Kediri	7.78
Jember	6.84
Surabaya	6.71
Nasional	6.60
Malang	5.91
Denpasar	4.30
Mataram	4.16

Sumber : Data BPS Pusat, diolah

2.6. PERBANDINGAN INFLASI KOTA MATARAM DENGAN KOTA TERDEKAT

Membandingkan laju inflasi dengan wilayah terdekat NTB, Kota Mataram berada di urutan terakhir jauh setelah Kupang (sebagai kota yang mengalami inflasi tertinggi sebesar 9,71%), Kediri dan Jember. Pada triwulan ini, inflasi Kota Mataram berada pada level 4,16%, masih di bawah inflasi nasional sebesar 6,60%. Inflasi Denpasar yang sebelumnya mengalami inflasi terendah bertengger tepat di atas Mataram dengan inflasi 4,30%.. Diperkirakan tingginya kebutuhan NTB akan barang konsumsi yang didatangkan dari luar daerah menyebabkan daerah ini sangat rentan terhadap fluktuasi biaya transportasi, mengingat wilayah NTB dipisahkan oleh lautan dari pulau-pulau lainnya.

BAB III PERKEMBANGAN PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN

Trend kinerja positif secara konsisten ditunjukkan oleh perbankan di Nusa Tenggara Barat (NTB) hingga akhir triwulan IV 2006. Hal tersebut terlihat dari peningkatan aset dan dana pihak ketiga (DPK) masing-masing mencapai 6,44%(q-t-q) dan 12,56%(q-t-q). Namun demikian laju peningkatan kredit relatif lambat dibandingkan triwulan sebelumnya hanya mencapai 2,2% .

Lambatnya penyaluran kredit dibandingkan peningkatan DPK membuat rasio *loan to deposit* (LDR) turun dari 84,28% menjadi 77,22%. Sementara itu, tingkat risiko kredit menunjukkan perbaikan dengan turunnya rasio *non performing loan* (NPL) dari 3,05% menjadi 2,76%.

Di sisi lain, kegiatan pada sistem pembayaran relatif stabil dengan kecenderungan menurun pada akhir tahun. Kegiatan pembayaran non tunai via kliring maupun sarana BI *real time gross settlement* (RTGS) masih didominasi kegiatan transaksi pemerintah terutama terkait dengan dana-dana perimbangan, kelanjutan bantuan langsung tunai (BLT) dan bantuan operasional sekolah (BOS).

Masih dominannya transaksi ekonomi secara tunai menyebabkan jumlah uang tidak layar edar terus mengalami peningkatan pada mencapai 31,4% dari jumlah uang masuk ke KBI Mataram per akhir triwulan IV-2006. Temuan uang palsu secara nominal pada periode ini mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya dari Rp18 juta menjadi Rp12,85 juta.

3.1. Kinerja Perbankan di Propinsi Nusa Tenggara Barat

Peningkatan total aset, DPK dan kredit yang terjadi pada periode ini mencerminkan stabilnya kinerja perbankan. Mengamati perkembangan indikator perbankan terdapat kecenderungan peningkatan pada periode berikutnya. Namun demikian relatif lambatnya penyaluran kredit pada triwulan ini menyebabkan fungsi intermediasi belum dapat berjalan secara optimum. Hal ini terlihat dari penurunan LDR pada triwulan IV-2006 sebesar 77,22% setelah pada triwulan yang lalu menyentuh level 84,28%.

Di sisi lain risiko kredit cenderung membaik yang tercermin dari penurunan rasio NPL menjadi 2,76% (triwulan lalu mencapai 3,05%). Sayangnya membaiknya risiko kredit ini belum dapat direspon secara cepat oleh perbankan dengan meningkatkan penyaluran kreditnya.

Tabel 3.1 - Indikator utama perbankan Nusa Tenggara Barat								
KETERANGAN *)	Dec-03	Dec-04	Dec-05	Mar-06	Jun-06	Sep-06	Dec-06	y-o-y
I. Asset	3.76	4.66	5.50	5.68	6.01	6.32	6.73	22.40
1. Bank Umum	3.58	4.43	5.23	5.41	5.72	6.01	6.38	22.06
2. BPR	0.18	0.23	0.27	0.28	0.29	0.31	0.35	29.05
II. DPK	2.90	3.46	4.07	4.20	4.55	4.55	5.08	24.91
1. Bank Umum	2.81	3.34	3.92	4.06	4.40	4.39	4.90	24.83
2. BPR	0.09	0.12	0.14	0.15	0.16	0.16	0.18	27.04
III. Kredit	1.94	2.64	3.35	3.58	3.79	3.93	3.91	16.58
1. Bank Umum	1.81	2.48	3.15	3.37	3.56	3.70	3.66	16.17
2. BPR	0.13	0.16	0.20	0.22	0.23	0.24	0.25	23.03
IV. LDR	66.70	76.25	82.43	85.20	83.19	86.44	79.29	(6.67)
1. Bank Umum	64.25	74.23	80.34	83.03	80.99	84.29	77.22	(6.94)
2. BPR	141.78	131.67	139.41	144.69	145.34	143.78	135.01	(3.16)
V. NPLs (gross)	3.52	2.51	2.66	2.81	2.99	3.05	2.76	3.74
1. Bank Umum	2.65	1.89	2.05	2.21	2.32	2.46	2.21	7.59
2. BPR	15.59	12.15	12.30	12.30	13.39	12.17	11.30	(8.14)

*)dalam triliun Rp, kecuali LDR & NPL (%)

Sumber Data : Laporan Bank di NTB.

Seluruh data perbankan yang dibahas pada bab ini menggunakan sumber data yang sama.

3.2. Bank Umum

Pada triwulan IV-2006, kinerja bank umum menunjukkan peningkatan, terlihat dari membaiknya hampir semua indikator utama yaitu total aset, DPK, kredit, dan NPL, sedangkan LDR mengalami penurunan karena masih lambannya penyaluran kredit perbankan di triwulan ini.

3.2.1. Kelembagaan

Masih sama dengan triwulan yang lalu, jumlah institusi bank umum yang beroperasi di Nusa Tenggara Barat sebanyak 15 bank yang terdiri dari 5 bank pemerintah & 10 bank swasta, dengan 1 (satu) kantor pusat (PT. Bank NTB), 32 kantor cabang lainnya yang juga disebut dengan kategori sebagai bank pelapor, 34 kantor cabang pembantu (KCP), 54 kantor unit dan 100 unit mesin ATM.

Sedangkan berdasarkan kegiatan usahanya terbagi menjadi 28 kantor cabang konvensional dan 4 kantor cabang syariah.

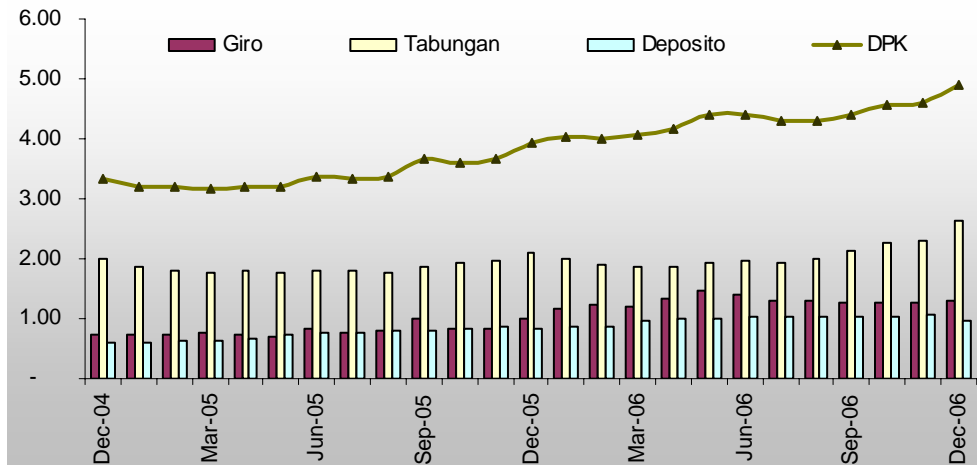
3.2.2. Aset

Per Desember 2006 total aset bank umum mencapai Rp6,38 triliun meningkat 6,92% dibandingkan triwulan lalu. Sayangnya penyebaran aset masih belum merata, Ibukota Propinsi NTB yaitu Kota Mataram (termasuk Kabupaten Lombok Barat) mendominasi dengan komposisi total aset bank umum sebesar 60,02%, disusul Kabupaten Bima (termasuk Kota Bima) sebesar 11,60%, Kabupaten Sumbawa (termasuk Sumbawa Barat) sebesar 10,55%, Kabupaten Lombok Timur sebesar

6,85%, Kabupaten Lombok Tengah sebesar 6,69% dan terkecil di Kabupaten Dompu yaitu hanya sebesar 3,97%

3.2.3. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Grafik 3.1 - Perkembangan DPK bank umum (triliun Rp)

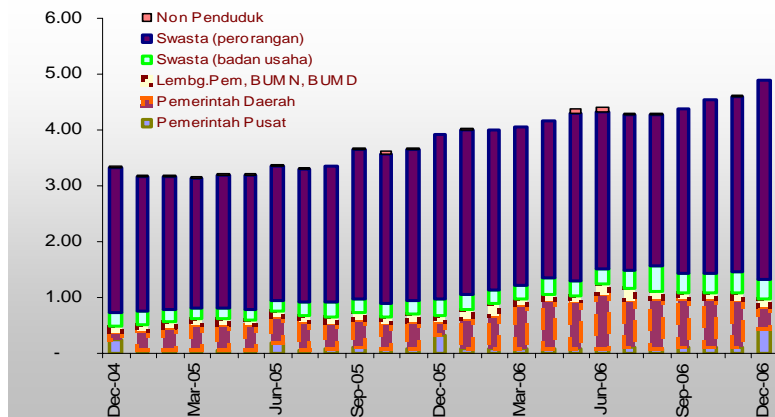


Total DPK bank umum pada periode ini tercatat sebesar Rp4,90 meningkat sebesar 12,59% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (q-t-q). Peningkatan tertinggi terjadi pada tabungan sebesar 23,63% disusul giro sebesar 4,50% sementara deposito mengalami penurunan sebesar 4,52%.

Meningkatnya sumber dana yang berasal dari tabungan diperkirakan dipicu oleh peningkatan aktivitas perekonomian terutama sub sektor perdagangan besar dan eceran bersamaan dengan tibanya dua hari raya di triwulan ini. Sedangkan menurunnya angka deposito lebih disebabkan adanya relokasi penempatan sumber dana masyarakat ke giro dan tabungan untuk menjaga posisi likuiditasnya disamping adanya pemanfaatan sumber dana bagi aktivitas bisnisnya.

Kepemilikan DPK masih didominasi oleh swasta perorangan dengan kecenderungan meningkat pada mulai triwulan yang lalu . Hal ini diperkirakan dipicu oleh pergeseran dari DPK yang dimiliki pemerintah daerah ke swasta (perorangan) karena adanya pembayaran uang muka awal terhadap pengerjaan proyek dan pembayaran ganti rugi tanah masyarakat yang terkena berbagai proyek pemerintah daerah (seperti pembangunan bendungan di Lombok Timur).

Grafik 3.3- Perkembangan golongan pemilik DPK BU (Trilyun Rp)



Komposisi sumber dana masyarakat yang ditempatkan dalam bentuk simpanan Giro, secara umum masih didominasi oleh sumber dana yang berasal dari sektor pemerintah (70,84%) Hal ini menandakan bahwa aktivitas ekonomi NTB masih sangat bergantung kepada dana APBD, mengingat kegiatan bisnis pada umumnya menggunakan sarana ini (cek/bilyet giro) dalam aktivitas transaksinya. Sedangkan sumber dana yang berasal dari tabungan dan deposito lebih didominasi oleh sektor swasta terutama dari perseorangan masing-masing sebesar 99,13% dan 96,86%.

Tabel 3.2 - Komposisi golongan pemilik dana (%)

Keterangan	DPK	Giro	Tab.	Dep.
I. Penduduk	99.74	99.56	99.81	99.80
A. Sektor Pemerintah	20.05	70.84	0.68	3.94
1. Pemerintah Pusat	8.94	33.41	0.02	0.08
2. Pemerintah Daerah	7.91	28.82	0.01	1.09
(i) PemProv.	1.83	6.87	-	-
(ii) PemKab/Kota	6.08	21.94	0.01	1.09
3. Lembaga Pemerintah, BUMN, BUMD.	3.20	8.61	0.65	2.77
B. Sektor Swasta	79.69	28.72	99.13	95.86
1. Perusahaan, yayasan, koperasi	6.07	12.43	1.52	9.76
2. Perseorangan	72.89	13.83	97.58	85.84
3. Lainnya	0.72	2.46	0.02	0.26
II. Bukan Penduduk	0.26	0.44	0.19	0.20

Hingga triwulan keempat tahun 2006, bank pemerintah masih mendominasi penghimpunan dana pihak ketiga. Pada periode ini, bank swasta hanya mampu meraih 23,03% dari total DPK bank umum, sisanya dikuasai oleh bank pemerintah terutama DPK dalam bentuk giro sebanyak 92,33%.

Relatif tidak berubah, sebaran penghimpunan dana berdasarkan lokasi kantor bank pelapor masih terkonsentrasi di Kota Mataram/Kab.Lombok Barat yang mencapai lebih dari 60% dari jumlah dana yang masuk ke bank umum, menandakan bahwa aktivitas kegiatan ekonomi masih terpusat di Ibukota Propinsi. Ke depan, dengan dibangunnya berbagai sarana dan prasarana terutama di Kabupaten Lombok Tengah (seperti bandara internasional Lombok) diharapkan dapat meningkatkan aktivitas kegiatan ekonomi di sekitarnya.

Tabel 3.3 - Komposisi penghimpunan dan sebaran dana pihak ketiga (%)

Keterangan	DPK	Giro	Tab.	Dep.
Penghimpunan dana				
Bank Pemerintah (termasuk BPD)	76.97	92.33	76.99	56.26
Bank Swasta Nasional	23.03	7.67	23.01	43.74
Sebaran dana (%)				
1) Kodya Mataram/Lombok Barat	63.14	57.57	57.69	85.27
4) Kab. Sumbawa/Sumbawa Barat	12.55	14.64	13.80	6.39
3) Kab/Kota Bima	9.54	12.41	10.30	3.65
5) Kab. Lombok Timur	7.21	6.89	9.40	1.77
6) Kab. Lombok Tengah	4.78	4.99	6.06	1.04
2) Kab. Dompus	2.78	3.50	2.75	1.88

Sementara itu, perkembangan kesadaran menabung di Nusa Tenggara Barat dalam 5 tahun terakhir relatif stabil dengan kecenderungan sedikit menurun. Hal ini tampak dari perkembangan rasio jumlah penabung dengan pendekatan jumlah rekening tabungan di bank umum terhadap jumlah penduduk relatif bergerak di kisaran 20-22%.

Tabel 3.4 - Perkembangan jumlah rekening DPK Bank Umum

Keterangan	Dec-03	Dec-04	Dec-05	Mar-06	Jun-06	Sep-06	Dec-06
Giro	13,620	13,452	12,955	13,941	13,921	12,899	12,303
Tabungan	920,700	891,814	921,358	927,701	870,685	910,493	857,678
Deposito	9,859	8,560	8,765	9,183	9,206	9,252	9,460
Jumlah Penduduk &)	4,005,360	4,076,040	4,143,292	4,160,819	4,178,347	4,195,874	4,213,402
Rasio Kesadaran menabung *)	22.99	21.88	22.24	22.30	20.84	21.70	20.36

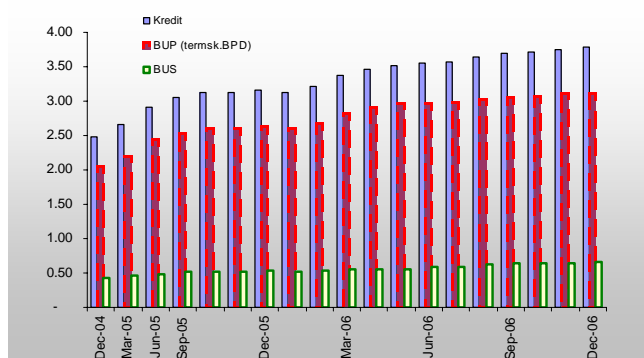
*) *Jml rek.tab./jml penduduk*
&) *Sumber NTB dalam angka, 2006 angka proxy*

3.2.4. Kredit

Pertumbuhan kredit di NTB hingga triwulan III 2006 menunjukkan peningkatan sebagai respon positif atas trend penurunan BI Rate dari 12,50 menjadi 9,75% yang turut mempengaruhi penurunan tingkat bunga kredit, meskipun rata-rata tingkat bunga kredit modal kerja dan konsumsi yang sedikit bergerak naik (berbeda dengan tingkat bunga investasi) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya disebabkan perbankan sedikit perlu waktu menyesuaikan tingkat bunga pinjamannya.

Peningkatan kredit bank umum secara nominal lebih didorong oleh bank umum yang dimiliki oleh Pemerintah (termasuk BPD), meskipun laju pertumbuhannya hingga triwulan IV 2006 lebih rendah 1,73% (q-t-q) dibandingkan dengan bank umum milik swasta sebesar 4,86%(q-t-q).

Grafik 3.4 - Perkembangan kredit di NTB (triliun Rp)

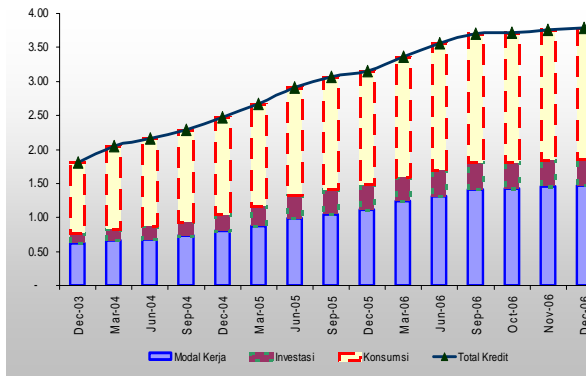


Keunggulan jaringan yang tersebar hampir di seluruh daerah tingkat Kabupaten/Kota menjadikan bank umum pemerintah mendominasi pangsa

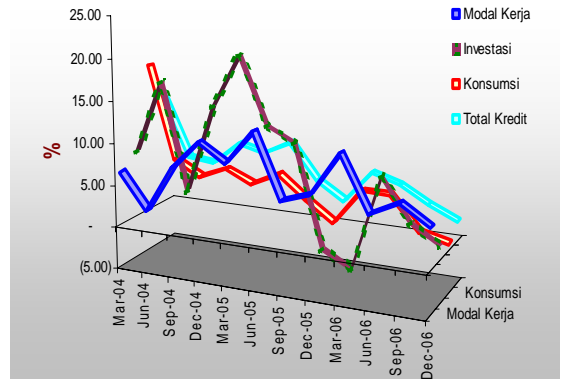
penyaluran kredit bank umum di Nusa Tenggara Barat sebesar 82,31%.

Perkembangan kredit bank umum di NTB yang sebelumnya lebih banyak didominasi oleh kredit konsumsi, saat ini pergerakannya tampak mulai melambat dibandingkan dengan perkembangan kredit yang disalurkan untuk modal kerja. Ini menunjukkan komitmen bank umum untuk lebih memperhatikan sektor produktif meski risiko yang dihadapi sedikit lebih besar di atas kredit konsumtif.

Grafik 3.5 - Perkembangan outstanding kredit jenis penggunaan (triliun Rp)



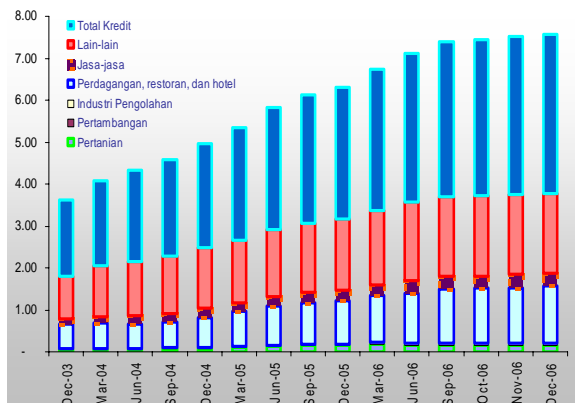
Grafik 3.6 - Pertumbuhan kredit menurut jenis penggunaan (%)



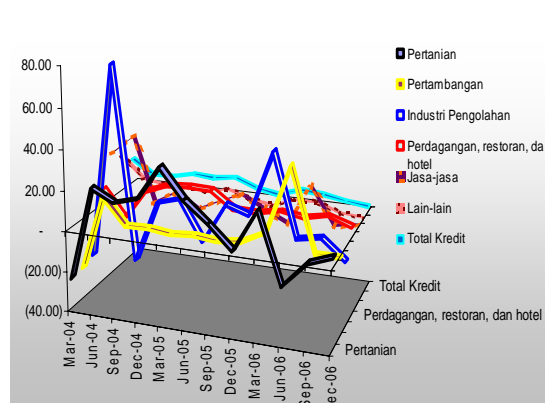
Pertumbuhan kredit bank umum (Grafik 3.6) dalam 3 (tiga) tahun terakhir cenderung fluktuatif dengan kecenderungan menurun di triwulan IV-2006. Pertumbuhan tertinggi pada periode ini terjadi pada kredit modal kerja sebesar 2,36% sementara kredit konsumtif hanya tumbuh 0,82%. Diperkirakan tinggi pertumbuhan kredit modal kerja dipicu oleh peningkatan kebutuhan kredit untuk mempersiapkan *supply* barang-barang kebutuhan menyongsong kegiatan musiman (hari raya keagamaan).

Hal yang cukup menggembirakan adalah bahwa distribusi penyaluran kredit yang saat ini masih didominasi oleh sektor konsumsi, proporsinya cenderung menurun. Per Desember 2006 porsi kredit untuk sektor produktif mencapai 60,24% sementara kredit untuk konsumsi sebesar 39,76%. Diperkirakan pada tahun-tahun mendatang distribusi kredit yang disalurkan untuk kegiatan produktif (modal kerja dan investasi) akan lebih mendominasi penyaluran kredit.

Grafik 3.7 - Perkembangan outstanding kredit sektoral (triliun Rp)



Grafik 3.8 - Pertumbuhan kredit sektoral (%)



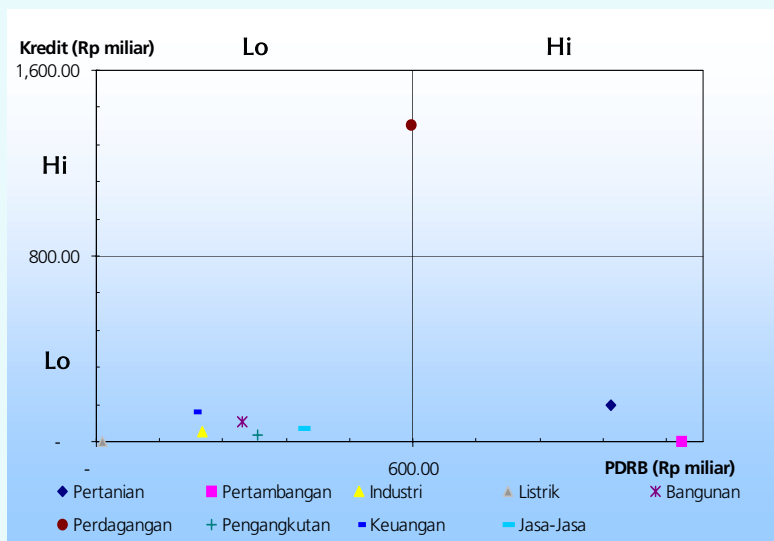
BOKS-1

PERANAN KREDIT SEKTORAL PADA NILAI PDRB SEKTORAL NTB

Kredit yang disalurkan ke dua sektor unggulan Prop NTB, yakni sektor pertambangan dan sektor

pertanian dengan nilai PDRB tertinggi masing-masing mencapai Rp1.107 miliar dan Rp975 miliar per Desember 2006, relatif masih kecil masing-masing hanya sebesar Rp 0,35 miliar dan Rp155 miliar.

Grafik-Matriks Penyaluran Kredit Sektorial Vs Nilai PDRB Sektorial

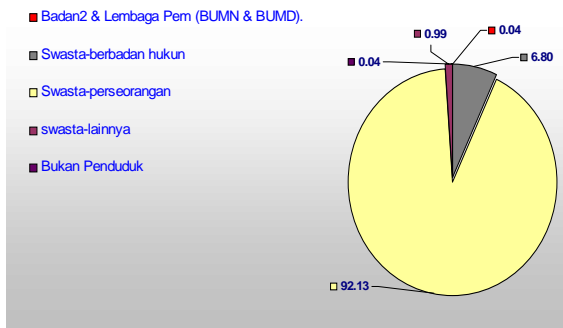


Sektor pertambangan yang didominasi PT Newmont Nusa Tenggara diperkirakan tidak memerlukan kredit mengingat struktur modalnya yang kuat dengan dukungan penuh dari *parent company*-nya di US. Sementara itu, sektor pertanian yang menghasilkan nilai PDRB

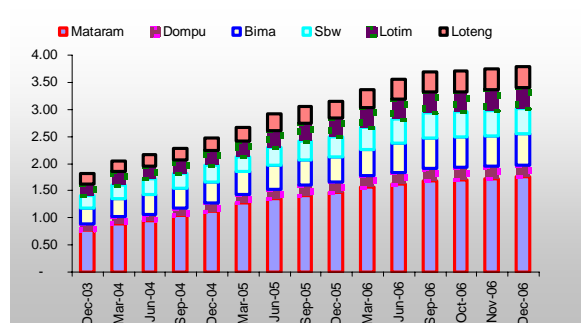
kedua tertinggi setelah sektor pertambangan tampaknya masih luput dari penyaluran kredit perbankan. Produktivitas pertanian yang masih rendah dapat ditingkatkan dengan adanya perbaikan teknologi. Untuk itu perbankan perlu memberi prioritas penyaluran kredit jangka panjang terhadap sektor ini sehingga mampu menghasilkan nilai PDRB yang lebih besar lagi.

Secara sektoral, kredit terkonsentrasi pada sektor lain- lain (konsumsi) diikuti oleh sektor perdagangan, restoran dan hotel. Hingga triwulan IV- 2006 kredit yang disalurkan untuk sektor lain- lain (termasuk konsumsi) mencapai angka sebesar Rp2,03 triliun atau 50,21%% dari Rp3,66 triliun kredit yang disalurkan oleh bank umum. Hampir semua sektor pertumbuhannya melambat bahkan cenderung sedikit menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, kecuali sektor pertanian yang mengalami peningkatan pertumbuhan mencapai 3,98% (q-t-q). Peningkatan kredit sektor pertanian dipicu kebutuhan dana menjelang musim tanam di awal 2007.

Grafik 3.9 - Komposisi golongan debitur bank umum per Des 06 (%)



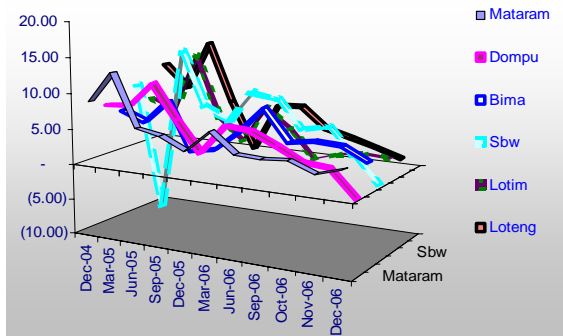
Grafik 3.10 - Sebaran perkembangan penyaluran kredit bank umum (triliun Rp)



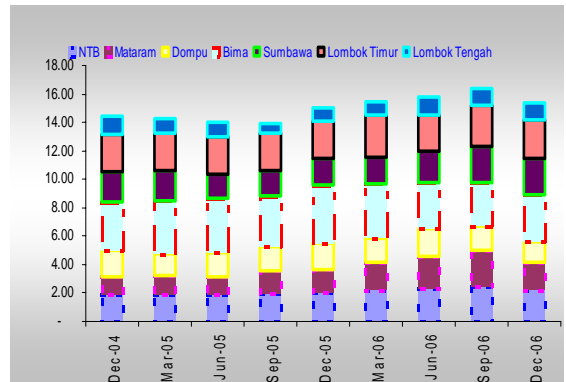
Sama dengan triwulan sebelumnya, mayoritas kredit sebesar 92,13% oleh perseorangan, disusul oleh kelompok swasta yang berbadan hukum sebanyak 6,80% dan sisanya terbagi oleh kelompok swasta lainnya dan golongan bukan penduduk serta badan-badan dan lembaga pemerintah. Relatif sedikitnya porsi bagi kelompok swasta berbadan hukum mencerminkan bahwa sektor riil yang dimotori oleh swasta berbadan hukum untuk industri berskala menengah ke besar hampir tidak ada di wilayah ini, sehingga perlu adanya inisiatif terutama dari pemerintah daerah agar di NTB muncul industri yang berskala menengah ke besar mengingat tersediannya sumber daya baik bahan baku maupun tenaga kerja (seperti industri berbasis pertanian, industri rokok, pengalengan hasil laut dan tanaman pangan atau buah-buahan).

Penyaluran kredit bank umum masih terpusat di Ibukota Propinsi NTB yaitu Kota Mataram (Gafik 3.10) yang mencapai 45,25% dari total kredit yang diberikan. Belum adanya sentra ekonomi atau industri yang dikembangkan di luar kota Mataram menyebabkan penyebaran kredit belum merata ke daerah kabupaten lainnya di NTB. Dari sisi pertumbuhan penyebaran kredit menurut lokasi kantor bank berada (Grafik 3.11), pertumbuhan kredit hampir semua daerah menurun dibandingkan dengan pertumbuhan kredit pada 2 (dua) triwulan sebelumnya. Hanya kota Mataram yang mengalami peningkatan sebesar 3,68% (q-t-q) dipicu maraknya aktivitas ekonomi di periode ini.

Grafik 3.11 – Pertumbuhan sebaran kredit bank umum (%)



Grafik 3.12 - Perkembangan NPL bank umum (%)



Sementara itu tingkat risiko kredit yang diukur dari rasio NPL (*Non Performing* dalam 2 tahun terakhir menunjukkan trend peningkatan hingga mencapai puncaknya sebesar 2,46% di triwulan yang lalu. Pada periode ini risiko kredit membaik dengan rasio NPL menurun mencapai 2,21% penurunan kredit. Secara umum penurunan tersebut diperkirakan dipicu oleh pelunasan kredit jatuh tempo serta membaiknya kualitas usaha debitur .

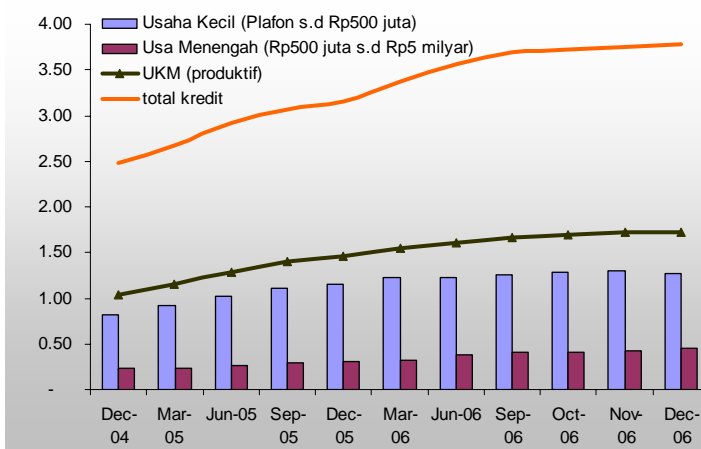
Berdasarkan lokasinya (Grafik 3.12 & Tabel 3.5), bank umum di Mataram, Lombok Timur dan Dompur mengindikasikan adanya perbaikan risiko kredit dengan turunnya rasio NPL dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, sebaliknya bank umum di daerah lainnya cenderung mengalami kenaikan risiko kreditnya, sehingga perlu upaya yang komprehensif untuk memitigasi terjadinya peningkatan risiko terhadap kredit yang disalurkan, antara lain peningkatan pemahaman terhadap pentingnya penerapan asas *prudential banking* dan pengenalan optimal terhadap karakter kondisi usaha calon debitur, dan kondisi sektor yang akan dibiayai.

Sementara itu, tingkat risiko penyaluran kredit tertinggi oleh bank umum di regional NTB terjadi pada bank umum yang berlokasi di Bima dengan rasio NPL sebesar 3,25%. sedangkan NPL

terendah terjadi pada bank umum yang berlokasi di Kabupaten Lombok Tengah sebesar 1,17%.

Rasio NPL secara sektoral tertinggi di NTB terjadi pada sektor konstruksi yang mencapai angka sebesar 4,45%. Lambannya realisasi investasi fisik pemerintah diperkirakan menjadi faktor utama meningkatnya NPL pada

Grafik 3.13 - Perkembangan kredit UKM-Produktif bank umum (trilyun Rp)



sektor tersebut. Sektor perdagangan, hotel dan restoran menduduki urutan kedua dengan NPL

sebesar 3,56%. Hal tersebut berkorelasi dengan pesatnya pertumbuhan di sektor perdagangan terutama sub sektor perdagangan besar dan eceran.

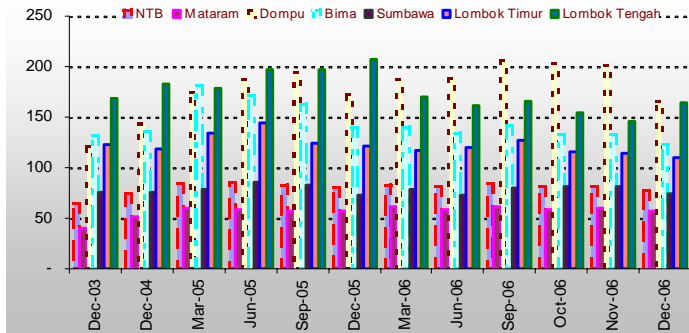
Hampir tidak adanya unit industri berskala menengah ke besar di wilayah NTB menjadikan penyerapan kredit bank umum lebih didominasi perseorangan dengan plafon kredit maksimal tidak lebih dari Rp5 milyar (98,66% dari total kredit sebesar Rp3,78triliun per posisi Des'06). Sedangkan penyaluran kredit UKM (Usaha Kecil dan Menengah) yang murni disalurkan untuk sektor produktif pada periode ini mencapai pangsa sebesar 47,62% dari total kredit bank umum. Penciptaan peluang usaha UKM baru yang tersebar di berbagai kecamatan melalui sinergi antar institusi terkait, dipastikan akan dapat menambah jumlah pengusaha-pengusaha UKM baru yang mampu memberikan nilai tambah tersendiri bagi masyarakat setempat.

Tabel 3.5 - Penyaluran kredit berdasarkan lokasi kantor bank umum

Keterangan	NTB	Mataram	Dompu	Bima	Sbw	Lotim	Loteng
Kredit	3,782	1,749	226	575	458	390	385
Pangsa	100.00	46.25	5.98	15.20	12.10	10.30	10.17
NPL	2.21	1.97	1.45	3.25	2.62	2.71	1.17
Jenis Penggunaan							
Modal kerja	1,470	690	110	221	165	154	130
NPL	2.21	2.59	1.78	5.22	3.52	4.92	2.13
Investasi	401	192	34	48	69	11	47
NPL	3.19	3.14	0.92	2.91	6.03	3.79	0.98
Konsumsi	1,910	867	83	306	224	224	207
NPL	1.21	1.22	1.23	1.88	0.90	1.13	0.62
Sektor Ekonomi							
Pertanian	155	15	81	17	9	18	15
NPL	2.19	1.30	0.97	7.47	6.61	2.42	0.80
Pertambangan	0	0	0	0	0	0	0
NPL	-	-	-	-	-	-	-
Industri Pengolahan	44	38	1	1	1	1	1
NPL	0.42	0.21	2.15	-	0.83	7.03	0.16
Listrik, gas & air	2	2	0	0	0	0	0
NPL	-	-	-	-	-	-	-
Konstruksi	85	67	0	12	5	0	0
NPL	4.45	4.21	-	2.42	9.25	-	83.12
Perdagangan, restoran, dan hotel	1,367	615	53	237	216	131	115
NPL	3.56	2.83	2.41	4.66	4.10	5.54	2.43
Pengangkutan, perdagangan dan komunikasi	26	22	2	0	3	0	0
NPL	0.77	0.70	0.42	-	1.56	-	-
Jasa-jasa dunia usaha	125	106	2	1	0	15	1
NPL	1.93	1.73	-	33.77	-	1.66	1.85
Jasa-jasa sosial/masyarakat	59	14	0	0	0	0	44
NPL	2.09	8.02	-	-	-	4.68	0.23
Lain-lain	1,918	870	87	306	224	224	208
NPL	1.24	1.25	1.49	2.19	1.28	1.56	0.54
<i>Nominal (miliaran Rp.)</i>							
<i>Pangsa & NPL (%)</i>							

3.2.5. Loan to Deposit Ratio (LDR)

Grafik 3.14 - Perkembangan LDR bank umum (%)



Tabel 3.6 - Rasio LDR bank umum per Des '06

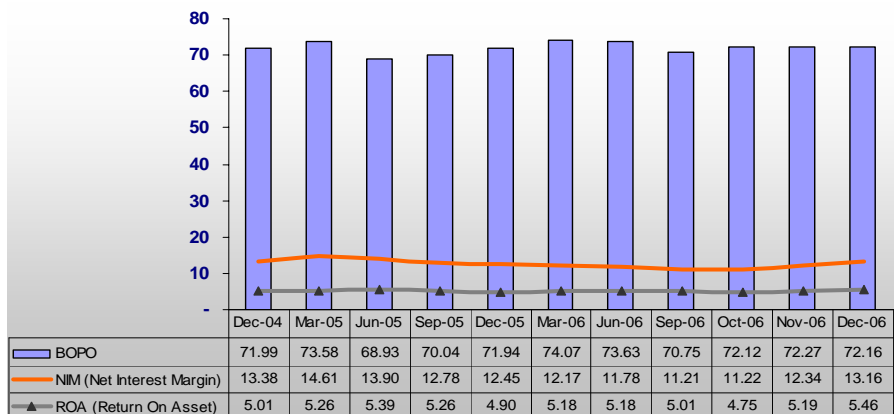
Daerah	LDR
Dompu	166.15
Lombok Tengah	164.45
Bima	122.94
Lombok Timur	110.25
Sumbawa	74.44
Mataram	56.57
NTB	77.22

Perkembangan LDR bank umum sepanjang tahun 2006 relatif stabil dengan kecenderungan menurun. Pada periode ini LDR NTB mencapai 77,22% menurun dibandingkan triwulan lalu sebesar 84,28%. Penurunan LDR mengindikasikan masih belum optimumnya fungsi intermediasi yang dijalankan bank umum pada periode ini.

Secara regional, tidak berbeda dengan triwulan sebelumnya, rasio LDR 4 daerah kabupaten/kota di NTB (Kabupaten Dompu, Lombok Tengah, Bima dan Lombok Timur) pada periode ini melampaui angka 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa keempat daerah tersebut lebih banyak menyalurkan dana dibandingkan dengan penghimpunan dana. Sedangkan di dua daerah lainnya yaitu Kota Mataram/ Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Sumbawa/Sumbawa Barat terjadi sebaliknya.

3.2.6. Profitabilitas & Efisiensi Bank Umum

Grafik 3.15 - Perkembangan profitabilitas bank umum



Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, profitabilitas bank umum belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Efisiensi bank umum yang ditunjukkan oleh rasio biaya operasional

terhadap pendapatan operasional (BOPO) masih bergerak pada kisaran 70%. Hal ini mencerminkan masih belum adanya perbaikan pada efisiensi operasional bank umum.

Rasio pendapatan usaha terhadap aset (ROA) juga masih relatif kecil pada kisaran 4-5%. Masih terdapat ruang untuk optimalisasi aset bank umum agar menghasilkan return/pendapatan usaha yang lebih besar. Sejalan dengan rasio BOPO dan ROA, rasio *net interest margin* (selisih pendapatan bunga dengan biaya bunga terhadap total aktiva produktif) masih rendah berada pada kisaran 12-13%. Dengan masih terbukanya peluang untuk peningkatan maka perlu upaya optimalisasi fungsi intermediasi serta peningkatan efisiensi operasional.

3.3. Bank Umum Syariah

Mengamati perkembangan bank umum syariah hingga triwulan IV-2006 dapat dikatakan telah terjadi pertumbuhan signifikan. Total aset tercatat sebesar Rp138,03 miliar jauh meningkat dibandingkan posisi September 2006. Di sisi lain, jumlah DPK yang terhimpun mencapai Rp99,53 miliar meningkat 25,60% dibandingkan triwulan lalu. Hal ini mencerminkan semakin tingginya kepercayaan masyarakat untuk menanamkan dananya pada bank umum syariah.

Tabel 3.7 - Indikator utama bank umum syariah di NTB

Keterangan	Dec-03	Dec-04	Dec-05	Mar-06	Jun-06	Sep-06	Dec-06	q-t-q
Asset *)	27.60	56.61	85.84	84.97	97.17	115.93	138.03	19.07
DPK *)	22.71	34.85	70.15	68.99	71.68	79.24	99.53	25.60
Finance *)	10.67	48.08	63.67	73.37	84.12	105.18	119.98	14.07
NPF (%)	-	0.09	0.44	0.52	0.56	5.19	0.53	(89.78)
FDR (%)	47.00	137.96	90.77	106.35	117.36	132.73	120.55	(9.18)

*) miliar Rp.

Perkembangan lebih pesat ditunjukkan dari pembiayaan yang disalurkan di mana pada posisi Desember 2006 tercatat sebesar sebesar Rp119,98 miliar atau meningkat sebesar 14,07% dari triwulan sebelumnya. Rasio FDR (*Finance to Deposit Ratio*) mengalami sedikit penurunan dari 132,73 menjadi 120,55% yang disebabkan peningkatan penghimpunan dana yang lebih besar dibandingkan dengan peningkatan penyaluran dana. Rasio FDR yang melebihi angka 100% tersebut menandakan bahwa minat masyarakat menempatkan dananya di bank umum syariah di wilayah ini relatif lebih kecil dibandingkan dengan masyarakat yang memanfaatkan sumber dananya.

Rasio *non performing finance* (NPF) yang sempat meningkat tajam pada triwulan lalu sebesar 5,19% telah kembali normal pada level 0,53%. Diperkirakan membaiknya kinerja usaha debitur mendorong perbaikan rasio NPF tersebut.

3.4. Perkembangan BPR

Tabel 3.8 - Indikator utama BPR di NTB

Keterangan	Dec-03	Dec-04	Mar-05	Jun-05	Sep-05	Dec-05	Mar-06	Jun-06	Sep-06	Dec-06	q-t-q
Asset	178	228	229	245	258	267	276	292	312	345	10.47
DPK	92	122	121	131	136	144	149	156	165	183	10.69
Kredit	130	160	174	185	196	200	215	227	237	247	3.94
LDR (%)	141.78	131.67	143.48	141.73	143.96	139.27	144.69	145.34	143.78	135.01	(6.10)
NPL (%)	15.59	12.15	13.37	13.54	12.78	12.30	12.30	13.39	12.17	11.30	(7.17)

Selain LDR & NPL, miliar Rp.

Perkembangan kinerja BPR hingga triwulan IV 2006 cukup baik ditunjukkan oleh peningkatan indikator kinerja utama BPR seperti total aset, DPK dan kredit serta mulai membaiknya performa dari tingkat risiko kredit meskipun rasio LDR yang sedikit menurun disebabkan peningkatan sumber dana yang lebih besar dibandingkan penyaluran dana.

3.4.1. Kelembagaan

Hingga posisi akhir triwulan IV 2006, terjadi penambahan 1 (satu) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang melaksanakan kegiatan usahanya secara syariah di Kota Mataram, sehingga sampai posisi akhir triwulan berjalan terdapat sebanyak 66 kantor pusat BPR dengan komposisi 46 BPR yang dimiliki oleh pemerintah daerah sedangkan sisanya 20 BPR dimiliki swasta dengan jumlah kantor cabangnya sebanyak 3 kantor.

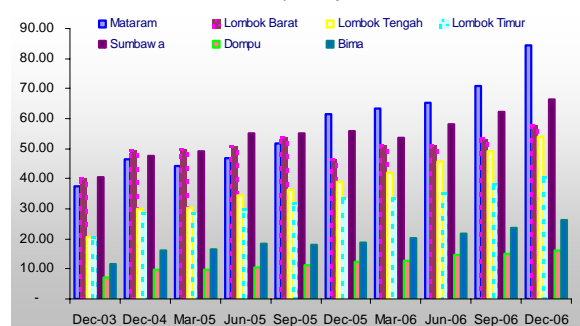
Wilayah operasional BPR mencakup wilayah kota Mataram sebanyak 6 kantor (5 KP dan 1 KC), Kabupaten Lombok Barat sebanyak 15 kantor (14 KP dan 1 KC), Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 11 kantor (11 KP), Kabupaten Lombok Timur sebanyak 11 kantor (11 KP), Kabupaten Sumbawa sebanyak 14 kantor (14 KP), Kabupaten Dompu sebanyak 4 kantor (4 KP) dan di Kabupaten Bima sebanyak 8 kantor (7 KP dan 1 KC).

Ditinjau dari kegiatan usahanya, sebanyak 63 kantor pusat dan 3 kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional, sedangkan 3 kantor pusat BPR lainnya dengan kegiatan usaha berdasarkan syariah.

3.4.2. Aset

Kinerja BPR hingga Desember 2006 diwarnai oleh percepatan peningkatan total aset mencapai Rp345 milyar atau meningkat 10,47% dibandingkan triwulan sebelumnya. Dominasi total aset di sektor *rural banking* masih dipegang oleh BPR milik pemerintah daerah yang

Grafik 3.17 - Perkembangan aset BPR per wilayah (milyar Rp)

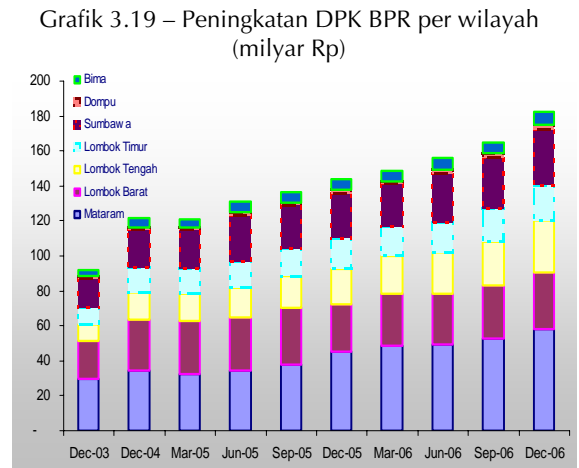
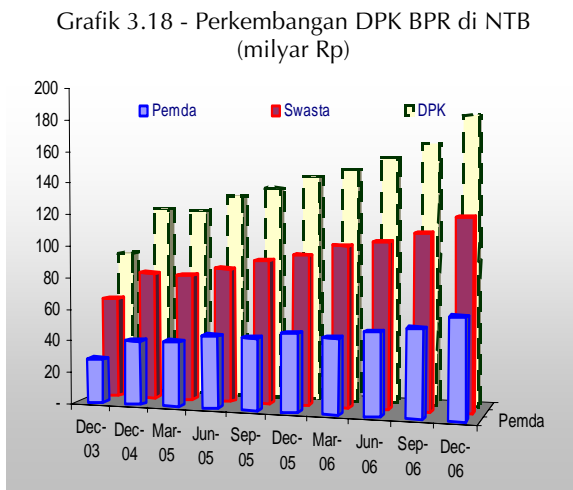


menguasai pangsa sebesar 51,54% dari total aset BPR di NTB.

Secara regional, hampir semua BPR di wilayah kabupaten/kota menunjukkan trend peningkatan aset, sejalan dengan peningkatan kredit dan penghimpunan dana pihak ketiganya.

3.4.3. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Total DPK yang berhasil dihimpun BPR meningkat sebesar 10,69% (q-t-q) mencapai nilai sebesar Rp183 milyar hingga akhir triwulan IV 2006. Kebalikan dari dominasi BPR yang dimiliki oleh pemerintah daerah pada total aset, penghimpunan DPK dikuasai sebesar 65,82% oleh BPR yang dimiliki swasta. Hal ini mencerminkan lebih aktifnya BPR swasta dalam penggalangan dana masyarakat dibandingkan dengan BPR milik pemda yang lebih cenderung mengandalkan sumber dana dari pemilik yang bersumber dari dana APBD..



Dari sisi regional per wilayah lokasi BPR berada, BPR yang berada di Lombok Tengah, Dompu dan Bima menunjukkan pertumbuhan DPK yang cukup besar pada kisaran 17%(q-t-q). Sementara itu daerah lainnya mengalami pertumbuhan pada kisaran 8-9%(q-t-q).

3.4.4. Perkembangan Kredit yang diberikan

Tabel 3.9 - Perkembangan Kredit dan NPL BPR di NTB

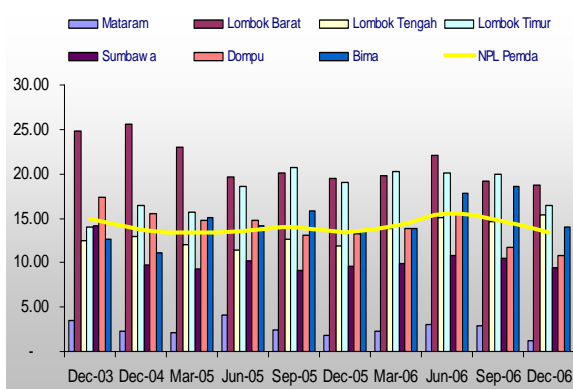
Keterangan	Dec-03	Dec-04	Mar-05	Jun-05	Sep-05	Dec-05	Mar-06	Jun-06	Sep-06	Dec-06	q-t-q
Total Kredit	130	160	174	185	196	200	215	227	237	247	3.94
a. Pemda	72	88	95	103	109	112	121	128	135	137	1.56
b. Swasta	58	73	78	83	87	89	94	98	103	110	7.06
NPL-BPR	15.59	12.15	13.37	13.54	12.78	12.30	12.30	13.39	12.17	11.30	(7.17)
a. Pemda	14.87	13.66	13.42	13.58	14.01	13.33	14.21	15.59	14.72	13.41	(8.87)
b. Swasta	16.48	10.33	13.31	13.49	11.23	11.00	9.83	10.51	8.83	8.67	(1.84)

Peningkatan fungsi intermediasi BPR pada triwulan ini masih rendah hanya sebesar 3,94% (q-t-q). Pada triwulan sebelumnya, pertumbuhan kredit mencapai 4,68%,. Hal ini mencerminkan

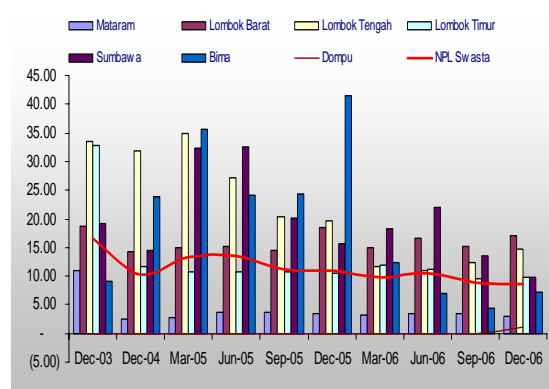
melambatnya penyaluran kredit pada triwulan IV-2006. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, BPR milik pemerintah daerah masih mendominasi penyaluran kredit di NTB.

Sementara itu, dibandingkan akhir 2005, risiko kredit BPR secara konsisten menunjukkan perbaikan dengan terus turunnya NPL mencapai 11,30% per Desember 2006. Meskipun terjadi penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya, namun masih relatif jauh di atas angka NPL indikatif yang ditetapkan sebesar 5% (netto). BPR milik Pemda menjadi penyumbang rasio NPL tertinggi yang mencapai angka 13,41% (gross), sedangkan BPR swasta hanya tercatat sebesar 8,67% (gross). Tingginya angka NPL merupakan cerminan kinerja kredit yang kurang baik, sehingga perlu upaya maksimal bagi kalangan BPR terutama milik Pemda untuk menurunkan rasio NPLnya, antara lain dengan mengintensifkan penagihan kredit *non performing* dan lebih *prudent* dalam penyaluran kredit.

Grafik 3.20 - Perkembangan NPL kredit BPR Pemda (%)



Grafik 3.21 - Perkembangan NPL kredit BPR Swasta (%)

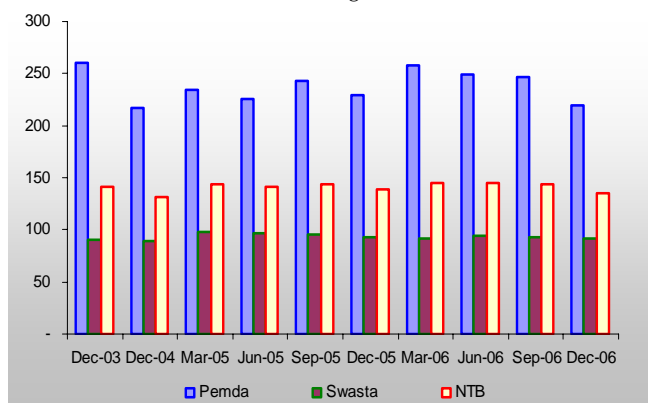


Secara regional, hampir semua daerah dimana BPR yang dimiliki oleh Pemda berada menunjukkan trend perbaikan tingkat risiko kredit, kecuali di Lombok Tengah yang mengalami peningkatan rasio NPL dari 14,59% menjadi 15,40%. Sementara itu, BPR yang dimiliki swasta, hanya yang berlokasi di Kota Mataram dan Kabupaten Sumbawa yang mengalami perbaikan rasio NPLnya, sedangkan BPR yang berlokasi di daerah lainnya cenderung mengalami peningkatan risiko kredit.

3.4.5. Loan to Deposit Ratio

Pola pada triwulan-triwulan sebelumnya terus berlanjut, hingga akhir triwulan IV 2006, rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR) BPR di NTB masih cukup tinggi yaitu sebesar 135,01%, atau sedikit menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang

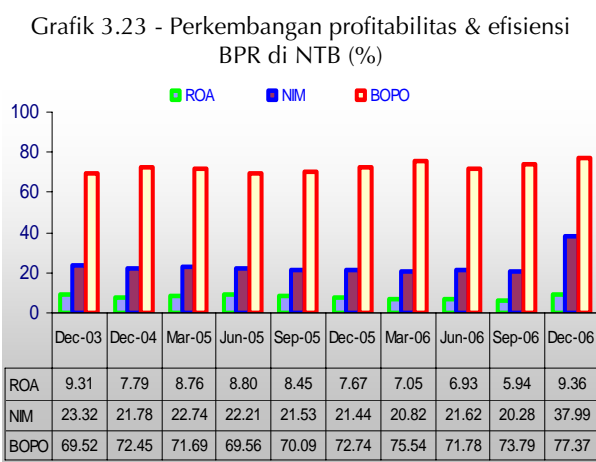
Grafik 3.22 - Perkembangan LDR BPR di NTB



tercatat sebesar 143,78%. Kenaikan sumber dana yang lebih besar dibandingkan dengan penyaluran dana, sebagai akibat dari adanya perpindahan aliran sebagian kecil dana bank umum ke BPR karena tingkat bunga yang lebih kompetitif menjadai salah satu pemicunya.

LDR BPR milik Pemda cenderung di atas level 200%, sedangkan BPR swasta berada pada kisaran 90% dalam 1 tahun terakhir. Tingginya rasio LDR BPR milik Pemda karena masih sangat tergantung dari sumber dana pemilik (setoran modal pemerintah propinsi dan kabupaten). Adanya rencana penggabungan usaha PD BPR LKP diperkirakan mampu mengoptimalkan dan mengefisienkan kegiatan operasional BPR tersebut.

3.4.6. Profitabilitas & Efisiensi BPR



Pada triwulan IV 2006, tingkat efisiensi BPR yang diukur dari rasio BOPO cenderung memburuk dengan rasio meningkat mencapai 77,37% setelah sempat menyentuh level terendah 71,78% pada pertengahan tahun 2006.

Peningkatan rasio BOPO ini turut pula mengoreksi rasio ROA (*Return On Asset*) dan margin pendapatan bunga yang tercermin dari rasio NIM (*Net Interest Margin*). Naiknya rasio BOPO lebih disebabkan oleh meningkatnya

biaya operasional yang tidak sejalan dengan peningkatan pendapatan operasional, akibat meningkatnya beban bunga, penghimpunan DPK dan meningkatnya biaya tenaga kerja.

3.5. Perkembangan Sistem Pembayaran

Seiring menggeliatnya aktivitas ekonomi regional NTB pada triwulan ini, aktivitas sistem pembayaran di NTB pun turut mengalami peningkatan.. Hal ini didukung oleh kegiatan transaksi pemerintah terutama yang terkait dengan dana-dana perimbangan, bantuan langsung tunai (BLT) dan bantuan operasional sekolah (BOS). Serta peningkatan kegiatan ekonomi yang salah satunya dipicu oleh sub sektor perdagangan besar dan eceran bersamaan dengan tibanya hari raya keagamaan di triwulan ini.

Jumlah uang yang tidak layak edar dalam rentang waktu 5 (lima) tahun terakhir ini berada di level 20-30% dari jumlah uang masuk ke Kantor Bank Indonesia Mataram, sementara itu jumlah

temuan uang palsu sudah mencapai angka Rp83,41 juta atau meningkat sebesar 73,66% dibandingkan tahun 2005.

3.5.1. Transaksi Keuangan Secara Tunai

3.5.1.1. Aliran Uang Masuk/Keluar (Inflow/Outflow)

Aliran uang keluar di NTB pada triwulan IV-2006 melebihi aliran uang masuk yang secara total menimbulkan *net outflow* sebesar Rp 192 milyar. Penyebabnya antara lain dari kelanjutan realisasi dana bantuan langsung tunai (BLT) tahap terakhir yang bersumber dari Program Kompensasi Pengurangan Subsidi (PKPS), dan intensitas puncak kegiatan ekonomi yang secara musiman terjadi di Triwulan III hingga IV, sehingga meningkatnya aliran dana *inflow* maupun *outflow* terjadi pada triwulan tersebut.

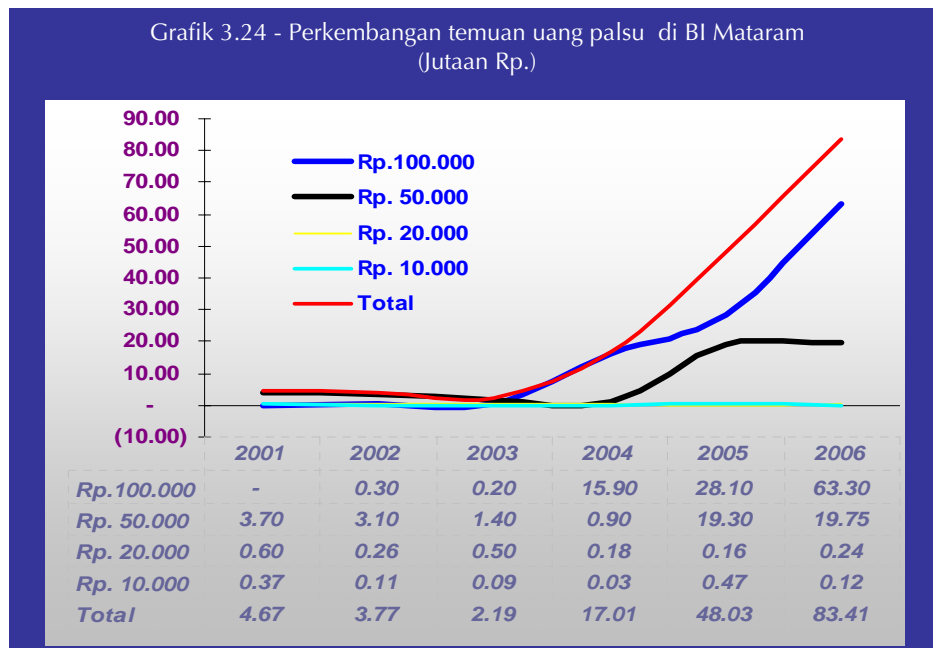
Tabel 3.10 - Perkembangan aliran uang di KBI Mataram
Milyar Rp.

Posisi	Inflow	Outflow	Net Inflow	PTTB	% PTTB thd inflow
2002	2,622	2,379	244	601	22.91
2003	2,834	3,022	(188)	674	23.78
2004	3,248	3,341	(93)	690	21.25
2005	3,600	3,835	(236)	1,018	28.29
<i>Tw.I</i>	814	698	115	188	23.13
<i>Tw.II</i>	818	937	(119)	244	29.83
<i>Tw.III</i>	840	1,107	(267)	314	37.38
<i>Tw.IV</i>	1,128	1,093	35	272	24.11
2006	3,455	3,779	(324)	700	20.25
<i>Tw.I</i>	1,082	922	160	266	24.58
<i>Tw.II</i>	1,112	1,342	(230)	158	14.21
<i>Tw.III</i>	1,261	1,515	(254)	276	21.87
<i>Tw.IV</i>	1,136	1,328	(192)	390	34.33
y-o-y	0.71	21.50	(648.57)	43.38	
q-t-q	(9.92)	(12.36)	(24.48)	41.40	

Sementara itu, rata-rata jumlah uang yang dimusnahkan atau disebut Pemberian Tanda Tidak Berharga (PTTB) terhadap aliran uang masuk (*inflow*) berada di level 20 – 30% dalam 5 tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan jumlah uang yang tidak layak edar di daerah ini masih cukup tinggi disebabkan faktor geografis dan belum optimalnya kesadaran masyarakat terhadap tata cara penyimpanan dan penggunaan uang secara benar diperkirakan menjadi pemicunya. Sudah merupakan tugas Bank Indonesia (*Clean Money Policy*) agar uang yang beredar di masyarakat selalu tetap terjaga kualitasnya antara lain memusnahkan uang yang dianggap sudah tidak layak edar (lusuh) di samping terus melakukan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat tentang tata cara menyimpan, memegang dan menggunakan uang kertas secara baik dan benar agar selalu terjaga kualitasnya.

3.5.1.2. Uang Palsu

Jumlah uang palsu yang menjadi temuan di Kantor Bank Indonesia Mataram sampai dengan triwulan IV di tahun 2006 sudah mencapai angka Rp83,41 juta meningkat 73,66% dibandingkan akhir tahun 2005. Hal ini merupakan indikasi meningkatnya jumlah peredaran uang palsu di wilayah Nusa Tenggara Barat. Angka tersebut diperkirakan semakin membesar apabila digabung dengan temuan yang dilakukan secara langsung oleh institusi yang berwenang (kepolisian atau kejaksaan).



Dari data temuan uang palsu sebesar Rp83,41 juta pada tahun 2006 (Grafik 3.24), sebanyak 60,17% merupakan temuan uang palsu dengan pecahan Rp100.000,-. Semakin meningkatnya temuan uang palsu dengan pecahan paling besar tersebut, menandakan pihak-pihak tertentu relatif tidak terlalu sulit untuk memalsukannya, sehingga perlu menjadi pemikiran bagi Bank Indonesia untuk mengganti jenis pecahan ini dengan nilai nominal yang berbeda ataupun menariknya kembali dari peredaran.

3.5.2. Transaksi Keuangan Secara Non Tunai

3.5.2.1. Transaksi RTGS (*Real Time Gross Settlement*)

Sepanjang tahun 2006, jumlah transaksi keuangan secara non tunai melalui sarana RTGS secara total nominal yang tercatat di Kantor Bank Indonesia Mataram mengalami peningkatan 42,38% dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini sejalan pula dengan peningkatan transaksi keuangan secara non tunai yang lebih dominan diperuntukan bagi transaksi-transaksi yang terkait dengan

pemerintah terutama yang bersumber dari dana-dana perimbangan, dana BLT (Bantuan langsung Tunai dan BOS (Bantuan Operasional Sekolah), di samping intensitas transaksi pihak ketiga lainnya (melalui perbankan) terkait dengan peningkatan aktivitas kegiatan ekonomi di sub sektor perdagangan besar dan eceran.

Tabel 3.12 - Transaksi RTGS di Kantor Bank Indonesia Mataram
Nom. (milyar rp.)

Posisi	Transfer Send		Transfer Received		Total	
	Lbr.	Nom.	Lbr.	Nom.	Lbr.	Nom.
2004	4,208	4,825	2,168	3,752	6,376	8,577
2005	4,572	4,648	2,202	4,174	6,774	8,821
<i>Tw.I</i>	1,027	858	551	818	1,578	1,675
<i>Tw.II</i>	1,110	1,061	559	1,049	1,669	2,110
<i>Tw.III</i>	1,228	1,100	544	1,139	1,772	2,239
<i>Tw.IV</i>	1,207	1,629	548	1,168	1,755	2,797
2006	3,702	6,461	1,938	4,007	5,640	10,468
<i>Tw.I</i>	1,303	1,519	568	963	1,871	2,482
<i>Tw.II</i>	1,565	2,477	603	1,368	2,168	3,844
<i>Tw.III</i>	834	2,465	767	1,676	1,601	4,142
<i>Tw.IV</i>	815	2,351	1,090	1,631	1,905	3,982
y-o-y (%)	(32.48)	44.32	98.91	39.67	8.55	42.38
q-t-q (%)	(2.28)	(4.64)	42.11	(2.69)	18.99	(3.85)

3.5.2.2. Transaksi Kliring

Transaksi keuangan non tunai lainnya adalah transaksi melalui kegiatan kliring, di mana hingga triwulan IV-2006 secara nominal dan lembar transaksi mengalami penurunan masing-masing sebesar 34,88%(y-o-y) dan 50,89%(y-o-y). Kegiatan transaksi kliring yang cenderung turun tersebut disebabkan sejak pertengahan Juni tahun ini telah dilakukan penerapan Sistem Kliring Nasional (SKN), di mana salah satunya adalah penggunaan warkat kredit yang tidak lagi menjadi bagian dalam kegiatan kliring, tetapi telah secara langsung dikreditkan kepada bank penerima melalui sistem yang baru tersebut.

Di sisi lain, masih minimnya penggunaan cek atau bilyet giro di wilayah ini menandakan bahwa peranan giralisasi belum maksimal mengingat sebagian besar kegiatan transaksi masih menggunakan uang kartal. Sementara itu, jumlah kepemilikan dana yang ditempatkan pada rekening giro di bank umum yang ada di NTB sebagian besar (70,84% dari total nominal giro) merupakan dana milik pemerintah.

Data Perputaran Kliring di KBI Mataram

Posisi	Perputaran Kliring	
	Lbr.	Nominal *)
2001	139,081	5,150
2002	148,047	4,639
2003	150,099	2,441
2004	171,127	2,586
2005	171,316	3,064
<i>Tw. I</i>	39,226	673
<i>Tw. II</i>	40,940	723
<i>Tw. III</i>	45,077	785
<i>Tw. IV</i>	46,073	883
2006	103,019	1,971
<i>Tw. I</i>	40,904	698
<i>Tw. II</i>	38,662	712
<i>Tw. III</i>	23,453	561
<i>Tw. IV</i>	22,627	575
q-t-q	(3.52)	2.44
y-o-y	(50.89)	(34.88)

**) miliar rupiah*

BAB IV PERKEMBANGAN KEUANGAN DAERAH DI NUSA TENGGARA BARAT

REALISASI APBD TRIWULAN IV 2006

Pertumbuhan ekonomi di NTB sudah berada pada jalur yang benar, namun percepatan pertumbuhan yang terjadi belumlah optimal. Pertumbuhan ekonomi di triwulan IV-2006 dibandingkan triwulan yang sama tahun lalu mencapai 4,16% namun secara tahunan ekonomi NTB hanya bertumbuh 1,65%.

Stimulus pengeluaran pemerintah sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi masih belum sesuai harapan. Diperkirakan sebagian besar realisasi belanja APBD di daerah tingkat II secara rata-rata berada di kisaran 83%. Jumlah yang relatif sub optimal untuk mendorong investasi fisik yang dapat menggerakkan perekonomian NTB.

Tabel 4.1-Proxy Realisasi APBD 2006 Hingga Triwulan IV-2006 Propinsi, Kota Mataram, Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Tengah, Kab. Sumbawa Barat, Kab. Dompus, Kab. Bima & Kota Bima (miliar Rp)

NO.	KETERANGAN	PROP	MTR	LOBAR	LOTENG	SBW	KSB	DOMPU	BIMA	KOTA BIMA
I	PENDAPATAN	714.84	226.07	310.99	461.91	226.77	209.19	287.49	361.85	237.78
	1. PENDAPATAN ASLI DAERAH	221.25	16.39	17.10	17.65	9.79	17.56	8.29	15.07	3.92
	2. DANA PERIMBANGAN	493.59	209.68	293.89	444.26	216.98	191.62	279.21	346.78	233.86
	3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	BELANJA	755.82	248.68	319.19	446.85	244.68	234.57	278.84	389.43	224.13
	1. APARATUR DAERAH	428.97	130.25	248.91	319.27	172.65	98.11	192.56	279.97	143.35
	2. PELAYANAN PUBLIK	167.75	100.71	57.09	90.56	56.11	115.52	53.54	85.54	66.33
	3. BELANJA BAGI HASIL & BANTUAN KEUANGAN	154.95	16.63	11.12	36.04	15.62	15.74	24.45	22.17	13.45
	4. BELANJA TIDAK TERSANGKA	4.14	1.08	2.07	0.98	0.30	5.20	8.28	1.74	1.00
	SURPLUS (DEFISIT)	(40.98)	(22.61)	(8.19)	15.06	(17.91)	(25.38)	8.66	(27.58)	13.65
III	PEMBIAYAAN	40.98	22.61	8.19	(15.06)	17.91	25.38	(8.66)	27.58	(13.65)
IV	NON ANGGARAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : <http://www.djapk.depkeu.go.id/>, diolah

Dari sisi pendapatan, diperkirakan secara rata-rata realisasi hingga triwulan IV-2006 berada di kisaran 84%. Untuk Propinsi NTB diperkirakan mengalami realisasi pendapatan tertinggi yakni Rp715 miliar atau hampir mencapai 100% dari jumlah yang dianggarkan. Sementara itu realisasi terendah diperkirakan dialami Kab. Sumbawa dengan tingkat realisasi 62% ekuivalen dengan Rp226,77 miliar.

Mengamati trend realisasi belanja di daerah tingkat II se-NTB, diprediksi realisasi terendah dialami oleh Kab. Sumbawa (64%), selaras dengan rendahnya realisasi pendapatan di daerah tersebut. Di sisi lain, berkolerasi dengan tingginya realisasi pendapatan, Prop. NTB diperkirakan mengalami realisasi belanja tertinggi mencapai 100,77% atau ekuivalen dengan Rp755,82 miliar.

Lebih tingginya realisasi belanja dibandingkan pendapatan menyebabkan sebagian besar daerah di NTB mengalami defisit yang ditutup dari selisih penerimaan dengan pengeluaran daerah. Hanya Kab. Domu dan Kota Bima yang diperkirakan mengalami surplus anggaran.

Tabel 4.2-Proxy % Realisasi APBD 2006 Hingga Triwulan IV-2006 Propinsi, Kota Mataram, Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Tengah, Kab. Sumbawa Barat, Kab. Dompu, Kab. Bima & Kota Bima

NO.	KETERANGAN	PROP	MTR	LOBAR	LOTENG	SBW	KSB	DOMPU	BIMA	KOTA BIMA
I	PENDAPATAN	99.97	65.51	66.17	97.33	62.25	93.09	97.23	80.34	97.97
	1. PENDAPATAN ASLI DAERAH	93.00	72.72	53.89	87.52	45.65	100.08	86.68	77.46	63.56
	2. DANA PERIMBANGAN	103.45	65.00	67.20	97.77	63.28	92.50	100.00	86.50	100.03
	3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	BELANJA	100.77	70.58	67.39	95.35	64.14	85.70	93.09	86.56	91.86
	1. APARATUR DAERAH	137.95	110.04	105.18	218.89	114.94	82.59	99.64	98.69	112.53
	2. PELAYANAN PUBLIK	58.02	48.11	25.69	31.79	27.12	87.45	71.25	62.29	64.95
	3. BELANJA BAGI HASIL & BANTUAN KEUANGAN	110.78	75.13	87.52	97.74	66.05	84.33	110.47	85.77	103.60
	4. BELANJA TIDAK TERSANGKA	41.07	43.16	99.83	97.70	44.93	124.94	92.15	58.15	66.38
	SURPLUS (DEFISIT)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
III	PEMBIAYAAN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
IV	NON ANGGARAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : <http://www.djapk.depkeu.go.id/>, diolah

Masih rendahnya realisasi belanja modal berkorelasi dengan masih rendahnya pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) di NTB yang secara rata-rata tumbuh 5,60% sepanjang 2006. Mengingat pentingnya realisasi belanja modal tersebut untuk pelayanan publik dalam percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, maka di tahun 2007 pemerintah daerah NTB harus mengupayakan langkah-langkah optimalisasi dan percepatan untuk realisasi belanja modal berdasarkan APBD 2007 yang hingga kajian ini diterbitkan masih dalam pembahasan oleh instansi terkait.

Secara keseluruhan, sepanjang dilakukannya optimalisasi pengeluaran anggaran belanja terutama belanja pada sektor pelayanan publik, roda pertumbuhan ekonomi regional diperkirakan akan bergulir lebih cepat di triwulan-triwulan mendatang.

BAB V PERKEMBANGAN INVESTASI DI NUSA TENGGARA BARAT

Mengamati perkembangan investasi di NTB sampai dengan triwulan IV-2006, data yang terhimpun dari BKPM Prop NTB belum menunjukkan adanya kemajuan yang berarti. Data perkembangan investasi dari BKPM tersebut meliputi data rencana dan realisasi kumulatif PMDN dan PMA di Propinsi NTB hingga Desember 2006.

Tabel 5.1

Rekapitulasi Perkembangan Rencana dan Realisasi PMA & PMDN Di Propinsi NTB (s.d Desember 2006)							
No	Sektor	Rencana Investasi PMDN (ribu Rp) dan PMA (ribu US\$)	Pangsa (%)	TK	Realisasi Investasi PMDN (ribu Rp) dan PMA (ribu US\$)	Pangsa (%)	TK
PMDN							
1	Tanaman pangan	2,250,000	0.06	100	125,000	0.01	11
2	Perikanan	481,711,877	13.48	3,754	146,316,915	14.34	1,893
3	Peternakan	53,013,900	1.48	275	6,060,198	0.59	113
4	Perkebunan	40,426,280	1.13	7,889	18,179,810	1.78	209
5	Kehutanan	1,766,875	0.05	322	20,584,000	2.02	638
6	Pertambangan	70,000	0.00	10	20,000	0.00	11
7	Industri	1,252,562,807	35.06	3,742	69,676,597	6.83	542
8	Pariwisata :						
	a. Perhotelan	1,678,728,448	46.99	8,235	716,997,275	70.29	1,494
	b. Jasa Wisata	13,808,494	0.39	392	7,926,317	0.78	107
9	Pengangkutan	38,744,500	1.08	886	32,859,500	3.22	492
10	Jasa Lainnya	9,745,550	0.27	81	1,338,200	0.13	24
	Total	3,572,828,731	100	25,686	1,020,083,812	100	5,534
PMA							
1	Perkebunan	21,269	0.38	2,706	73,528	2.38	1,132
2	Perikanan	25,773	0.46	2,054	11,501	0.37	667
3	Pertambangan	2,276,112	40.25	2,487	2,900,920	93.87	4,280
4	Industri	2,705,784	47.85	13,497	652	0.02	39
5	Pariwisata :						
	a. Perhotelan	580,691	10.27	4,554	62,056	2.01	1,036
	b. Jasa Wisata	5,315	0.09	600	1,673	0.05	301
6	Jasa lainnya	42,663	0.75	1,230	40,070	1.30	312
	Total	5,657,607	100	27,128	3,090,400	100	7,767

Sumber Data : BKPM Propinsi NTB, di olah

Hingga triwulan ini, secara kumulatif, tidak terdapat perubahan pada rencana maupun realisasi pada Penanaman Modal Dalam Negeri/PMDN, (masih sama dengan triwulan III-2006). Nilai rencana PMDN hingga triwulan ini sebesar Rp 3,57 triliun dan nilai realisasinya sebesar Rp 1.02

triliun. Sementara itu, rencana Penanaman Modal Asing (PMA) sampai dengan triwulan IV-2006 sedikit meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pada triwulan ini rencana PMA sebesar US\$ 5,657 miliar, meningkat US\$ 2,500 juta (0,04%) dari US\$ 5,655 miliar pada triwulan III-2006. Namun dari rencana tersebut, hingga periode ini belum ada yang terealisasi. Nilai realisasi PMA hingga Desember 2006 belum bergerak, masih sebesar US\$ 3,09 miliar.

Sejak tahun 70-an sampai dengan saat ini, realisasi investasi di NTB masih sangat rendah. hanya sebesar 28,55% untuk PMDN dan 54,63% untuk PMA. Dari rencana investasi kumulatif PMDN sebesar Rp3,572 triliun, hanya Rp1,020 triliun yang terealisasi. Demikian pula dengan rencana kumulatif PMA sebesar US\$5,657 miliar, hanya terealisasi sebesar US\$3,090 miliar.

Tabel 5.2

Rekapitulasi Perkembangan Rencana dan Realisasi PMA & PMDN Di Propinsi NTB (s.d September 2006)							
No	Sektor	Rencana Investasi PMDN (ribu Rp) dan PMA (ribu US\$)	Pangsa (%)	TK	Realisasi Investasi PMDN (ribu Rp) dan PMA (ribu US\$)	Pangsa (%)	TK
PMDN							
1	Tanaman pangan	2,250,000	0.06	100	125,000	0.01	11
2	Perikanan	481,711,877	13.48	3,754	146,316,915	14.34	1,893
3	Peternakan	53,013,900	1.48	275	6,060,198	0.59	113
4	Perkebunan	40,426,280	1.13	7,889	18,179,810	1.78	209
5	Kehutanan	1,766,875	0.05	322	20,584,000	2.02	638
6	Pertambangan	70,000	0.00	10	20,000	0.00	11
7	Industri	1,252,562,807	35.06	3,742	69,676,597	6.83	542
8	Pariwisata :						
	a. Perhotelan	1,678,728,448	46.99	8,235	716,997,275	70.29	1,494
	b. Jasa Wisata	13,808,494	0.39	392	7,926,317	0.78	107
9	Pengangkutan	38,744,500	1.08	886	32,859,500	3.22	492
10	Jasa Lainnya	9,745,550	0.27	81	1,338,200	0.13	24
	Total	3,572,828,731	100	25,686	1,020,083,812	100	5,534
PMA							
1	Perkebunan	21,269	0.38	2,706	73,528	2.38	1,132
2	Perikanan	25,773	0.46	2,054	11,501	0.37	667
3	Pertambangan	2,276,112	40.25	2,487	2,900,920	93.87	4,280
4	Industri	2,703,784	47.81	13,469	652	0.02	39
5	Pariwisata :						
	a. Perhotelan	580,191	10.26	4,542	62,056	2.01	1,036
	b. Jasa Wisata	5,315	0.09	600	1,673	0.05	301
6	Jasa lainnya	42,663	0.75	1,230	40,070	1.30	312
	Total	5,655,107	100	27,088	3,090,400	100	7,767

Sumber Data : BKPM Propinsi NTB, di olah

Ditinjau dari sisi sektoral, tampak bahwa sektor yang paling diminati oleh investor asing adalah sektor pertambangan. Realisasi PMA di sektor pertambangan ini mencapai 93,87% dari total

realisasi PMA di NTB. Hanya sebagian kecil investor asing yang merealisasikan investasinya di sektor perkebunan, sektor perhotelan, sektor jasa lainnya, sektor perikanan dan sektor industri. Jumlah tenaga kerja yang diserap PMA sebanyak 7.767 orang, sebagian besar bekerja di sektor pertambangan; sektor perkebunan dan sektor perhotelan. Sementara itu, investor lokal lebih cenderung berinvestasi ke sektor perhotelan dan perikanan. Sektor lain yang cukup diminati adalah sektor industri, pengangkutan dan kehutanan. Penyerapan tenaga kerja oleh PMDN berjumlah 5.334 orang, yang terbanyak di sektor perikanan dan perhotelan.

Hingga saat ini, beberapa permasalahan menyebabkan terhambatnya realisasi beberapa proyek investasi di NTB, antara lain :

- a. Rencana pembangunan bandara internasional di Lombok Tengah terhambat oleh masalah dana. Hal ini mengakibatkan proses perataan lahan bandara berjalan sangat lambat, karena alat-alat berat yang disiapkan di lapangan tidak memenuhi kebutuhan, tidak sebanding dengan luas lahan yang harus diratakan. Demikian pula dengan rencana pengeboran lahan dan topografi juga mengalami hambatan. Hal ini terkait dengan kesiapan Pihak PT. Angkasa Pura dalam menyiapkan berbagai sarana dan prasarana pengeboran.
- b. Pembangunan kilang minyak yang berlokasi di Dusun Awang, Desa Mertak, Kecamatan Pujut hingga saat ini masih menunggu persetujuan dari Menteri Kehutanan. Ijin tersebut diperlukan karena lahan yang digunakan untuk pembangunan kilang minyak tersebut adalah milik negara. Sedangkan ijin dari Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan Pemerintah Propinsi telah diperoleh.
- c. Keamanan hingga saat ini masih merupakan masalah utama bagi industri pertambangan di NTB. Kasus pembakaran/pengrusakan yang pernah di hadapi oleh PT Newmont Nusa Tenggara pada awal tahun 2006 menyebabkan terhambatnya kegiatan eksplorasi yang sebelumnya telah direncanakan. Pada umumnya lokasi pertambangan berada di wilayah pedesaan, sehingga faktor keamanan menjadi sangat penting, baik oleh pemerintah daerah, perusahaan tambang maupun masyarakat, terutama masyarakat yang berada disekitar lokasi lingkaran tambang.
- d. Pembangunan Listrik Tenaga Surya yang diprogramkan Dinas Pertambangan dan Energi Sumbawa yang berlokasi di Dusun Tanjung Bele Olat Rawa Kecamatan Moyo Hilir terhambat oleh belum terpenuhinya persyaratan tender sesuai ketentuan Kepres 80 tahun 2003. Untuk mengatasi masalah tersebut, akan dilakukan tender ulang.

Dalam rangka membuka peluang investasi di NTB, saat ini di Pulau Sumbawa dikembangkan 8 (delapan) sektor unggulan yang dikelompokkan dalam 3 kawasan investasi. Posisi geografis Sumbawa cukup menguntungkan karena berada di jalur lintas perdagangan dan kepariwisataan nasional serta memiliki sistem transportasi cukup lengkap melalui darat, laut dan udara. Sektor-sektor

yang akan dikembangkan adalah sektor peternakan, pertanian, perikanan dan kelautan, perkebunan kepariwisataan dan sektor pertambangan. Kawasan investasi yang menjadi konsep pengembangan adalah :

- a. Kawasan Agropolitan Alasutan, sebagai kawasan produksi berbasis pertanian lahan kering, meliputi wilayah Kecamatan Alas Barat, Alas, Utan, Buer dan Rhee. Kawasan Agropolitan Alasutan berpotensi dalam bidang pembangunan sarana dan prasarana perdagangan, industri pengolahan dan agro processing serta usaha budidaya.
- b. Kawasan Agrobappet Emprano, sebagai kawasan terpadu berbasis pesisir dan peternakan, meliputi Kecamatan Lopok, Lape, Maronge, Plampang, Empang dan Tarano. Kawasan investasi ini memiliki sejumlah peluang investasi pembibitan, penggemukan dan budidaya ternak, usaha penangkapan, budidaya dan pengolahan hasil laut, industri pakan serta sarana perdagangan.
- c. Kawasan Kota Terpadu Mandiri Sumbawa bagian selatan sebagai kawasan yang berbasis tanaman industri, meliputi Kecamatan Labangka, Lunyuk, Orong Telu, Ropang dan Moyo Hulu. Budidaya tanaman industri, perdagangan umum dan industri eksploitasi dan pengolahan hasil tambang.

Sebagai stimulus untuk meningkatkan investasi perlu diupayakan kemudahan-kemudahan dalam hal perijinan serta pemberian insentif pajak atau retribusi yang layak yang layak bagi calon investor yang akan masuk pada tahap awal investasi. Di samping itu, diperlukan pula koordinasi yang baik dari semua pihak terkait seperti pemerintah daerah, legislatif, pelaku dunia usaha, perbankan dan lembaga terkait lainnya untuk memajukan investasi di daerah ini. Kemitraan strategis antara investor dengan koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah yang sebagian besar mengisi sektor riil di NTB juga diperlukan sebagai salah satu upaya mendorong percepatan investasi.

BAB VI PROSPEK PEREKONOMIAN DAN INFLASI REGIONAL

5.1. PROSPEK MAKRO EKONOMI REGIONAL (*ECONOMIC OUTLOOK*)

Berdasarkan hasil survei kegiatan dunia usaha (SKDU) terhadap para pelaku dunia usaha, diperkirakan pada triwulan I-2007 mendatang, para pengusaha akan mengalami peningkatan kegiatan usaha pada beberapa sektor terutama pada sektor pertanian dan sektor keuangan, persewaan & jasa perusahaan yang tercermin pada SBT 14,05%. Indikasi meningkatnya perkiraan kegiatan usaha tercermin pada persepsi responden terhadap beberapa indikator, seperti ekspektasi positif terhadap produksi dan permintaan pada beberapa sektor.

Peningkatan kegiatan usaha diperkirakan akan terjadi pada beberapa sektor, terutama pada sektor pertanian dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan yang tercermin pada SBT masing-masing sebesar 16,05% dan 2,97%. Di sektor pertanian, peningkatan kegiatan usaha diperkirakan terjadi karena peningkatan pada subsektor tanaman bahan makanan dan subsektor tanaman perkebunan.

Sementara itu, ekspektasi responden yang menyatakan bahwa sektor pertanian mengindikasikan akan terjadi peningkatan kegiatan usaha didorong oleh perkiraan peningkatan kegiatan produksi serta peningkatan volume permintaan.

Meninjau lebih jauh, gambaran beberapa indikator makro ekonomi yang disurvei menunjukkan bahwa pada triwulan I-2007, harga jual/tarif diperkirakan akan kembali mengalami peningkatan dengan SBT sebesar 1,67%. Perkiraan kenaikan tersebut terutama disebabkan naiknya harga bahan baku dan biaya operasional perusahaan. Responden memperkirakan bahwa pada triwulan mendatang akan terjadi penurunan harga pada sektor pertanian dengan meningkatnya produksi/panen.

Ditinjau dari PDRB NTB, dengan melihat kecenderungan hasil produksi sektor pertambangan dan penggalian sebagai sektor yang mendominasi perekonomian NTB, pada triwulan mendatang, diperkirakan produksi sektor ini relatif tetap. *Share*-nya yang cukup tinggi terhadap PDRB NTB menyebabkan pengaruh perkembangan di sektor tersebut cukup signifikan pada angka pertumbuhan ekonomi NTB. I

Disisi lain, upaya mendongkrak angka pertumbuhan ekonomi NTB juga ditunjang dengan kecenderungan kebijakan perbankan untuk menyalurkan kreditnya pada sektor-sektor produktif. Berdasarkan kondisi yang diperkirakan tersebut dan ekspektasi hasil survei, pertumbuhan ekonomi NTB pada triwulan I-2007 diprediksi akan berkisar pada angka 4% ($\pm 1\%$).

5.2. PROSPEK INFLASI

Mencermati perkembangan laju inflasi Kota Mataram, pada triwulan I-2007 diperkirakan masih akan terus mengalami perlambatan dari periode sebelumnya, karena kondisi perekonomian regional yang semakin stabil dari sisi pergerakan harga-harga barang secara umum. Namun demikian, dengan adanya potensi bencana alam banjir di beberapa daerah di nusantara menurut perkiraan cuaca badan meteorologi dan geofisika (BMG) dikhawatirkan berpotensi menimbulkan *supply shock* yang dapat memicu inflasi *volatile foods*.

Tekanan harga dari fluktuasi *volatile foods* tersebut dapat memberikan dampak terhadap ekspektasi inflasi pada triwulan I-2007, namun efek ini diperkirakan tidak akan berlangsung lama dan inflasi akan cenderung kembali ke pola normalnya. Diperkirakan pada akhir triwulan pertama 2007 Kota Mataram akan mengalami inflasi sebesar 2% ($\pm 1\%$). Dengan asumsi tidak ada lagi kebijakan pemerintah yang berpengaruh terhadap inflasi *administered prices* secara kumulatif (y-t-d) sampai dengan akhir tahun 2007, angka inflasi Kota Mataram diprediksi dapat berada pada kisaran angka yang cukup rendah, sebesar 5% ($\pm 1\%$).

5.3 ISU-ISU STRATEGIS DAN REKOMENDASI

1. Isu-isu strategis dan anekdotal data:

a. Potensi distorsi sisi penawaran sektor pertanian

Memasuki musim tanam ketiga, kekeringan yang melanda sejumlah daerah telah menghambat kegiatan tanam para petani dan berpotensi menimbulkan distorsi di sisi penawaran tanaman bahan pangan. Puncak krisis air bahkan menyebabkan Kab. Lombok Tengah mengalami penyusutan debit air hingga setengah kondisi normal. Untuk mengatasi masalah ini, dinas pertanian setempat menyarankan pola tanam diarahkan pada pola tanam palawija. Selain itu pembangunan bendungan yang lebih besar perlu segera diwujudkan untuk menambah ketersediaan air di saat kemarau. Selama ini keberadaan embung dan waduk yang ada masih dianggap belum mencukupi kebutuhan air terutama untuk irigasi sektor pertanian.

b. Belum optimalnya pengolahan 12.000 Ha Lahan di NTB

Cukup memprihatinkan, lahan seluas 12.000 hektar di NTB yang dimiliki setidaknya 30 investor yang bergerak di subsektor pariwisata, perikanan dan perkebunan, hingga saat ini masih dibiarkan tak terkelola. Diperkirakan masih pesimisnya prospek usaha para investor membuat mereka enggan mengelola lahan tersebut. Akibatnya sejumlah lahan mengalami penyerobotan oleh penduduk setempat dan BKPM selaku instansi terkait mengeluarkan surat peringatan dengan sanksi pencabutan izin usaha. Ke depan, perlu dilakukan sinkronisasi

usaha pemberdayaan sektor UMKM dengan melibatkan para investor yang selama ini menelantarkan lahan yang dimilikinya agar pemanfaatan lahan tersebut menjadi optimal.

c. Ketimpangan sisi penawaran sub sektor listrik terhadap sisi permintaan

Seiring derap pertumbuhan ekonomi di NTB, kebutuhan energi listrik terus meningkat. Di kota Mataram sebagai kota terpadat di NTB, menurut informasi dari PLN setempat, peningkatan kebutuhan listrik setiap tahunnya diperkirakan mencapai 5% sementara kemampuan PLN menambah daya sekitar 5-10 megawatt. Ketimpangan sisi penawaran dengan sisi permintaan telah disikapi PLN dengan menyediakan empat unit mesin baru dengan kekuatan 1,4 megawatt masing-masing. Selain itu, pembangunan instalasi mesin listrik berbahan bakar residu tengah berlangsung dan diperkirakan selesai awal tahun 2007 dengan tambahan daya hingga 25 megawatt. Jika hal ini terealisasi dengan baik, maka jumlah daya yang saat ini 82 megawatt akan bertambah menjadi 117 megawatt lebih besar dari beban puncak 100 megawatt. Kelebihan daya ini dapat dialokasikan kepada para calon pelanggan yang selama ini masih berada pada daftar tunggu. Masalah energi listrik ini sepatutnya terus mendapat penanganan yang tepat untuk mendukung aktivitas dunia usaha yang tentunya sangat tergantung ketersediaan energi listrik.

d. Kualitas jalur darat belum mendukung distribusi komoditas sektor ekonomi

Transportasi darat di NTB selama ini berperan penting dalam distribusi berbagai komoditas. Masih rendahnya jumlah jalan dalam kondisi baik serta masih kurangnya akses ke daerah pemukiman petani transmigran membuat distribusi berjalan kurang lancar. Menurut data dari Dinas Kimpraswil NTB, dari 541,23 kilometer jalan negara di NTB hanya 243,55 km yang berada dalam kondisi baik, sedangkan 176,92 dalam keadaan rusak ringan. Keadaan itu diperparah dengan kemandapan jalan provinsi yang hanya sebesar 45,48% dari total 1.870 km ruas jalan, dan jalan kabupaten dengan kemandapan 59,13% dari 4.759 km ruas jalan. Masih banyaknya ruas jalan yang perlu diperbaiki tidak terlepas dari keterbatasan APBD 2006 yang hanya menganggarkan Rp20 miliar untuk perbaikan infrastruktur termasuk jalan. Kucuran dana dari pemerintah pusat sebesar Rp90 miliar pada tahun ini sedikit meringankan keuangan daerah untuk perbaikan 80 km ruas jalan di Pulau Sumbawa. Bantuan berupa *goods in kind* dari Jepang yakni 2 buah jembatan yang telah dibangun di Sumbawa turut membantu distribusi komoditas terutama untuk pemasaran hasil bumi dari para petani transmigran.

e. Potensi tinggi sub sektor peternakan masih belum diolah secara optimal

Berdasarkan data dari Dinas Peternakan NTB, potensi budidaya ternak di Prop NTB sangat tinggi. Hal ini antara lain terlihat dari masih luasnya padang penggembalaan yang mampu menampung 1,8 juta ekor ternak besar. Karakteristik geografis membuat Pulau Sumbawa cocok untuk pengembangan sapi Bali, sementara Pulau Lombok lebih cocok untuk

pengembangan sapi inseminasi buatan (IB). Menurut data terkini, setidaknya 10 propinsi menjadi daerah tujuan pengiriman ternak potong maupun ternak bibit dari NTB. Jumlah ternak bibit yang dikirim ke berbagai propinsi di antaranya Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Irian Jaya, mencapai rata-rata 4000 ekor per tahun. Namun demikian, dari lahan peternakan dengan potensi 1,8 juta ternak besar hingga kini baru dimanfaatkan sebesar 600.000 ekor. Hal ini menandakan masih besarnya potensi yang harus direalisasikan dengan dukungan dinas terkait di NTB.

Pada tahun 2010, ditargetkan pengembangan tanaman jarak mencapai area seluas 625.000 hektar dari area tanam saat ini yang baru 950 hektar. Masih minimnya lahan yang ditanami jarak membuat supply biji jarak relatif rendah. Akibatnya, 4 mesin pengolah dengan kapasitas 4 ton perhari yang diberikan Deperindag belum dapat digunakan secara optimal. Diperkirakan dengan pengembangan yang sedang berlangsung, pada akhir tahun 2006 jumlah lahan yang ditanami akan mencapai setidaknya 100.000 hektar. Mengingat potensi yang dimiliki NTB tidak tertutup kemungkinan NTB menjadi daerah penghasil minyak jarak terbesar sebagai alternatif BBM di Indonesia.

f. Rencana kenaikan UMP di 2007 berpotensi menghambat sektor riil

Rencana kenaikan upah minimum propinsi (UMP) 2007 untuk Prop NTB sebesar Rp655 ribu dari sebelumnya sebesar Rp550 ribu dinilai kurang tepat oleh pelaku dunia usaha di NTB. Menurut keterangan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) NTB, rendahnya produktivitas tenaga kerja serta masih belum efisiennya kegiatan operasional dunia usaha di NTB yang selama ini membuat hasil produksi NTB kurang kompetitif akan diperparah dengan rencana kenaikan UMP tersebut. Selain itu, bila UMP jadi dinaikkan akan menyebabkan ketidakmampuan para pengusaha untuk menyerap tenaga kerja lebih banyak mengingat masalah efisiensi dan produktivitas yang masih perlu diperbaiki. Bila hal ini tidak segera mencapai titik temu, tentunya berpotensi menyebabkan kemandekan aktivitas ekonomi di sektor riil. Sudah seharusnya musyawarah tri partit yang melibatkan pengusaha, pemerintah serta serikat pekerja diadakan untuk mencapai kesepakatan agar roda perekonomian tetap dapat berputar dan kesejahteraan tenaga kerja tidak terabaikan.

g. Pencairan dana bantuan kompensasi subsidi BBM

Pencairan dana BOS dan BOS khusus untuk pembelian buku mata pelajaran dengan total jumlah mencapai Rp8 miliar dapat terealisasi di akhir tahun ini terkait sudah dilakukan dropping dana yang ditampung di Bank NTB. Sama halnya pencairan BKM sejumlah Rp 0,4 miliar yang diperuntukkan bagi murid SMA/SMK.

Sementara itu, dana BLT tahap keempat atau tahap terakhir juga akan dicairkan pada Desember 2006. Menurut informasi dari Kementerian Sosial, program bantuan langsung

tunai (BLT) sebagai kompensasi penghapusan subsidi BBM akan dihentikan pada 2007 untuk diganti dengan program bantuan kualitas. Namun demikian, saat ini program bantuan kualitas masih dalam penggodokan oleh Bappenas untuk kemudian diujicobakan pada 7 propinsi di tahun 2007.

h. Kendala realisasi proyek pemerintah

Lambannya realisasi proyek pemerintah salah satunya disebabkan oleh keterbatasan alat berat untuk pengerjaan proyek. Menurut keterangan yang diperoleh dari Dinas Tarungkim Sumbawa, setidaknya masih terdapat 10% proyek jalan lingkungan yang terkendala minimnya alat berat. Bila proyek tersebut belum terselesaikan hingga akhir 2006 besar kemungkinan sisa pekerjaan akan diusulkan pada tahun anggaran 2007. Tentunya hal ini akan berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi di NTB.

i. Peningkatan investasi ke NTB belum sesuai harapan

NTB yang memiliki keunggulan komparatif secara grafis karena letaknya di segitiga emas yakni Bali, Pulau Komodo, dan Tanah Toraja berpotensi menarik minat investor. Menurut data BKPM, dibandingkan tahun lalu arus investasi asing ke NTB mengalami peningkatan 4,54%. Namun demikian, masih belum meratanya sarana infrastruktur di daerah menyebabkan lokasi investasi masih terkonsentrasi di Pulau Lombok. Perlu menjadi catatan, realisasi PMDN masih sangat rendah di bawah 30%. Diperkirakan lambannya realisasi tersebut disebabkan beberapa kendala meliputi kurangnya sarana dan prasarana penunjang investasi, kurangnya kebijakan di bidang investasi, kurangnya promosi ke luar negeri, potensi kerawanan ekonomi social maupun gejolak politik dan masalah perburuhan.